**BAB II**

**KAJIAN TEORI**

1. **Pengertian Persepsi**

Dalam kehidupan manusia dengan penuh perbedaan, latar belakang yang berbeda ataupun pemikiran, sehingga dari perbedaan tersebut dapat menjadi kesimpulan yang menjadi suatu kesempurnaan dan penilaian. Untuk menelaah suatu informasi dengan kesempurnaan indra, penafsiranpun kadang belum tentu sama antara yang satu dengan yang lainnya, proses yang seperti itu yang disebut persepsi. Jadi, persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap individu dalam memahami informasi yang datang dari lingkungan melalui indranya. Chaplin mengartikan persepsi sebagai proses mengetahui objek dan kejadian objek dengan bantuan indra. Sedangkan Morgan mengartikan persepsi sebagai “*The process of discriminating among stimuli and of interpreting their meaning*”.[[1]](#footnote-2)

Persepsi adalah proses dimana kita mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus ini dalam lingkungan.[[2]](#footnote-3) Menurut Prof. Dr. Lexy J. Moleong bahwa *persepsi* ialah ‘fenomenologi murni’ hanya mendiskripsikan dunia setiap orang; namun hampir semua ahli banyak tertarik pada sumber-sumber yang tidak disadari yang mengorganisasikan kesadaran. Teori fenomenologi terutama membagi tentang isu-isu bahasa sejauh manakah diberikan kepada peranan utama dalam membentuk pengalaman.[[3]](#footnote-4) Hal ini berarti suatu kegiatan yang sangat berkaitan dengan studi tentang proses kognitif, seperti ingatan dan berfikir. Dengan demikian setiap stimulus yang dipandang oleh seseorang akan mengalami perbedaan persepsi sesuai dengan tingkat ingatan atau cara berfikir serta menafsirkannya. Oleh sebab itu wajarlah manakala setiap orang yang mengamati sesuatu benda terjadi perbedaan persepsi.[[4]](#footnote-5)

Dalam arti sempit persepsi ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu; sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Sedangkan menurut De Vito persepsi adalah proses ketika menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita. Yusuf menyebut persepsi sebagai “pemaknaan hasil pengamatan”. Mendefinisikan persepsi sebagai proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungan melalui indra-indra yang dimilikinya. Rahat menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Bagi Atkison, persepsi adalah proses saat kita mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan. Menurut Verbeek, persepsi dapat dirumuskan sebagai suatu fungsi yang manusia secara langsung dapat mengenal dunia riil yang fisik. Brouwer menyatakan bahwa intrapsikis, dibentuk berdasar rangsangan-rangsangan dari objek. Pareek memberikan definisi yang lebih ihwal persepsi ini; dikatakan “persepsi dapat didefinisikan sebagai psoses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indra atau data”.[[5]](#footnote-6) Persepsi, yakni apa saja yang dialami oleh manusia, berawal dari alat sensor plus cara seseorang memperoleh informasi yang diterimanya. Persepsi itu bersifat kompleks, tidak ada hubungan satu lawan satu antara pesan yang terjadi di “luar sana” –dalam getaran udara dan dalam tanda-tanda hitam diatas sebelah kertas – dengan pesan yang artinya memasuki otak kita. Apa yang terjadi diluar dapat sangat berbeda dengan apa yang mencapai otak kita.[[6]](#footnote-7) Oleh kerena itu, untuk mengubah tingkah laku seseorang, harus dimulai dari mengubah persepsinya. Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama berikut:

1. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
2. Interpretasi, yaitu mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengkatagorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.
3. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai.[[7]](#footnote-8)

Menurut pandangan kontemporer, pesepsi berkembang melalui proses secara bertahap sejak bayi baru lahir hingga meninggal. Sejumlah hasil penelitian terbaru tentang perkembangan pesepsi bayi menunjukkan bahwa kemampuan-kemampuan persepsi bayi telah berkembang sejak awal-awal kehidupan.[[8]](#footnote-9) Sesuai dengan pendapat Leibniz mengatakan bahwa persepsi adalah suatu proses yang berkelanjutan dalam manusia yang terjadi waktu tidur, dan menyediakan kebersambungan manusia. Akan tetapi Kant mendefinisikan persepsi sebagai kesadaran yang disertai pengindraan yang hubungannya dengan skema estetika transendentalnya.[[9]](#footnote-10) Persepsi dan kognisi diperlukan dalam semua kegiatan psikologis. Bahkan, diperlukan bagi orang yang paling sedikit terpengaruh atau sadar akan adanya rangsangan menerima dan dengan suatu cara manahan dampak dari rangsangan. Seperti dinyatakandalam bagan berikut ini.[[10]](#footnote-11)

Penalaran

Rangsangan persepsi pengenalan tanggapan

perasaan

Oleh sebab itu penulis membuat judul persepsi masyarakat pesisir yang bermaksud ingin mengetahui gambaran ataupun pendapat masyarakat yang berdomisili di pesisir tepatnya di pantai Sidem tentang penyelenggaraan pendidikan Islam nonformal, keberagamaannya dan penerapannya. Dari pengertian persepsi diatas pada dasarnya menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya.

**B**. **Masyarakat Pesisir**

Selama berabad-abad, wilayah pesisir, yang membentang di sepanjang wilayah pantai utara, memegang peran penting sebagai garis depan Jawa dalam membangun kontak dengan dunia luar. Hindu, Islam, Kongsi dengan Eropa, dan kolonialisme. Dari pesisir, semua gelombang tadi merembes masuk ke pedalaman Jawa. Peran penting itulah yang menjadi alasan utama kepindahan pusat politik Mataram Hindu dari lembah Sungai Progo di Jawa Tengah ke maura Sungai Brantas di Jawa Timur; untuk memperbesar akses terhadap perdagangan antarnegeri. Selang enam abad kemudian sejarah juga menunjukkan bagaimana kekuasaan ekonomi politik Jawa mulai memasuki masa kemunduran dengan dipindahkannya ibu kota negeri dari Demak di Pesisir ke Karta di pedalaman. Bahkan pada masa kesultanan Mataram, kota-kota di Pesisir tetap bertahan sebagai Bandar yang aktif melayani arus perdagangan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan Jakarta-tempat VOC mendirikan basis utama-dan anatara Jawa dengan pilau-pulau lain. Dengan diserahkannya wilayah pesisir oleh Pakubuwana I kepada VOC, sebagai balas jasa atas bantuan pasukan dalam perang perebutan tahta Mataram, usaha dagang di Pesisir berpindah penguasaan dari pedagang bumi putera dan para adipati ke tangan VOC. Penguasa dagangnya berganti, namun intensitas perdagangannya terus berkembang. Pada abad ke-19 dan 20, jadilah kota-kota pesisir Jawa sebagai gerbang pengiriman produk-produk perkebunan Jawa ke Eropa dan penerimaan produk-produk impor ke Jawa. Dari gambaran tadi kita bisa mengerti mengapa dalam wacana besar Pesisir sering dihadirkan sebagai simbol keterbukaan dan kehidupan yang egaliter, karena hidup diwilayah ini lebih banyak berurusan dengan dagang yang liberal daripada dengan pertanian yang feudal. Namun demikian, simbol tersebut dibangun dari kehidupan di kota dan dari kalangan pedagang. Pedagang tidak semua orang di Pesisir tinggal di kota, dan juga – mustahil – semua orang jadi pedagang.

Sampai abad ke-18, wilayah di luar kota-kota pesisir masih merupakan padang belantara yang – menurut catatan resident Pekalongan, Rothenbuhler- dihuni oleh lebih banyak macan dan badak dari pada oleh manusia. Penduduk tinggal di kampung-kampung kecil yang tersebar luas dan mencari nafkah dengan jalan menjani petani ladang sambil memanfaatkan hasil-hasil hutan, ataupun menangkap ikan di pesisir.[[11]](#footnote-12)

Akan tetapi sesuai dengan perkembangan zaman pesisir laut selatan tidak sama halnya dengan awal masuknya Islam di Nusantara, ataupun dijadikan jalur informasi lewat laut. Laut selatan lebih dominan untuk mencari nafkah atau dijadikan tempat mata pencaharian sebagai penangkap ikan. Dengan banyaknya pendatang yang berdomisili di laut selatan yang tepatnya di pantai Sidem terbukti bahwa sangat kaya akan hasil laut.

Ada beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat pesisir, yaitu:

1. **Kemandirian hidup**

Dalam kebutuhan hidup, setiap individu pasti akan melakukan sesuatu usaha untuk memenuhi kebutuhan, kebutuhan materiil maupun imaterial. Untuk memenuhi kelangsungan hidup tentunya individu tidak tergantung pada individu lain, ada beberapa bantuan instansi atau lembaga yang menaunginya. Pada masyarakat pesisir yang profesinya sebagai nelayan ia menggantungkan diri pada alam dengan potensi yang ada di laut, dengan profesi menangkap ikan masyarakat pesisir ada bantuan pelatihan untuk mendapatkan hasil yang maksimal sehingga bisa terwujud masyarakat yang sejahtera. Di samping itu, tidak adanya pihak-pihak yang membantu secara total dan sungguh-sungguh dalam membangun masyarakat nelayan, mendorong masyarakat nelayan mengembangakan strategi kemandirian berdasarkan kemampuan sumber daya yang dimiliki untuk menyeleseikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Kemandirianini membangkitkan sikap-sikap otonom dikalangan nelayan mereupakan modal sosialyant sangat berharga sebagai basis kelangsungan hidup mereka. Manifestasi dari sikap-sikap otonom nelayan terwujud dalam konstruksi pranata sosial, seperti perkumpulan simpan-pinjam, arisan, dan jaringan sosial berfungsi untuk menggalang kemampuan sumber daya ekonomi kolektif dalam relasi timbal-balik sehingga eksistensi masyarakat nelayan tetap terjamin.

Untuk itu, sikap saling membantu mengatasi kesulitan sosial ekonomi dalam pertukaran sumber daya merupakan fakta sosial yang sangat intensif untuk kehidupan masyarakat nelayan. Sikap tersebut sangat membantu di lingkungan masyarakat nelayan karena usaha perikanan yang sangat spekulatif dalam memperoleh hasil tangkap. Misalnya, hari ini nelayan A memperoleh penghasilan, sedangkan dari nelayan B tetangga dekatnya, sudah tiga hari idak mendapatkan hasil tangkapan maka sudah menjadi kewajiban bagi nelayan A untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan, dan memberikan kepada nelayan B. Dengan demikian, sikap mandiri dan otonom dibangun sebagai respons atas kurangnya pemihakan kebijakan Negara atau pemerintah terhadap nasib nelayan, khususnya nelayan tradisional.

Untuk itu, sikap saling membantu dan jaringan pinjam-meminjam sumber daya ekonomi dan jasa merupakan salah satu unsur karakteristik sosial yang sangat penting. Sikap tersebut telah menjadi mentalitas secara sosial kehidupan nelayan, dan yang harus dilihat dalam kasus demikian yaitu adanya *trust* (saling percaya) diantara anggota warga masyarakat nelayan. Seandainya tidak ada sifat saling-percaya, masyarakat nelayan akan menghadapi situasi disintegrasi sosial, dan menyulitkan mereka menjaga kelangsungan hidup.[[12]](#footnote-13)

1. **Agama dan Kepercayaan Lokal**

Dalam masyarakat nelayan yang sebagai besar beragama Islam, awal sosialisasi keagamaan bagi anak-anak mereka dilakukan dengan mengajikan (al-Qur’an) di langgar atau mushola terdekat.[[13]](#footnote-14) Akan tetapi, selain mendidik anak untuk kemasyarakatan, penduduk pesisir memiliki ciri khas yang tentunya berbeda dengan masyarakat lain pada umumnya. Kekhasan itu tentunya dipandu oleh kebudayaan pesisir yang berbeda dengan masyarakat pedalaman. Di antara yang menonjol terutama dalam kaitannya dengan Islam ialah ciri masyarakat yang adaptif terhadap ajaran Islam dibanding dengan masyarakat pedalaman yang sinkretik. Budaya adaptif tersebut tampat dalam *performance* tradisi lokal yang dipandu dan dipedomani oleh Islam dalam coraknya yang mengambil ajaran Islam sebagai kerangka seleksi terhadap budaya lokal dan bukan mengambil yang relevan sebagaimana budaya pedalaman. Dalam hal ini, bagi masyarakat pesisir, Islam dijadikan sebagai kerangka referensi tindakan sehingga seluruh tindakannya merupakan ekspresi ajaran yang telah adaptif dengan budaya lokal.[[14]](#footnote-15)

Bagi penduduk dewasa, pendalaman agama dan upaya memperkuat ukhuwah islamiyah dilakukan dengan menghadiri pengajian-pegajian umum atau *manakiban* yang diadakan oleh masyarakat setempat atau karena undangan dari luar kota. Pengajian-pengajian lokal dalam bentuk pembacaan Surah Yasin dan Tahlil pada malam Jum’at bagi kaum laki-laki atau hari yang lain bagi istri-istri nelayan, juga dimanfaatkan untuk memperkuat tali silaturahmi dan merumuskan langkah kolektif untuk menyeleseikan persoalan kehidupan yang mereka hadapi, misalnya memobilisasi bantuan kepada tetangga yang terkena musibah.

Di kalangan masyrakat nelayan, puncak dari perilaku keagamaan yang diharapkan oleh semua orang adalah jika seseorang sudah bisa menunaikan ibadah haji. Di sebagian masyarakat nelayan yang cara berfikirnya masih sangat tradisional. Untuk mewujudkan naik haji ditempuh dengan memobilisasi seluruh sumberdaya ekonomi yang dimiliki habis-habisan. Untuk itu, yang penting bagi mereka adalah bisa menunaikan ibadah haji, walaupun setelah itu menghadapi kesulitan ekonomi yang berat atau jatuh miskin dan anak-anaknya putus sekolah karena ketiadaan biaya. Kompensasi bagi orang yang sudah berhaji adalah peningkatan status sosial di lingkungan masyarakatnya. Akan tetapi, apresiasi budaya masyarakat akan menurun jika seorang yang sudah berhaji tidak lagi menjalankan ajaran agama Islam secara benar, seperti kikir, pelit bersedekah, berjudi, main perempuan, dan tidak peduli terhadap persoalan kehidupan masyarakat.

Agama dan kepercayaan lokal lainnya yang menjadi pedoman kehidupan nelayan merupakan unsur penting untuk membantu akses ke penguasaan sumber daya perikanan, yang terwujud agar diberi keselamatan dan memper-oleh hasil tangkapan yang banyak pada saat melaut. Untuk itu, mereka akan mendatangi kiai memohon do’a dan barokahnya agar Allah SWT memberinya hasil tangkapan yang banyak. Kiai akan memberinya air kembang yang sudah diberi do’a dan disiramkannya pada jaring atau perahu nelayan. Di kalangan nelayan Madura tradisi seperti ini disebut *nyabis*.[[15]](#footnote-16)

1. **Etos Kerja Dalam Mengejar Kekayaan**

Etos adalah sikap mendasar terhadap diri mereka sendiri dan tehadap dunia mereka yang direferensikan dalam kehidupan. Etos kerja nelayan adalah sifat, nilai, semangat, atau sikap nelayan terhadap pekerjaan mereka, yakni melakukan penangkapan ikan di laut. Sebagai golongan sosial, nelayan memi-liki etos kerja yang berbeda dengan golongan sosial yang lain, seperti petani, peladang, atau pekebun. Perbedaan tersebut didasari oleh perbedaan kebudayaan yang dimiliki dan yang terbentuk karena kondisi lingkungan yang berbeda. Seperti pernyataan Boelaars bahwa orientasi kebudayaan nelayan ialah:

“Orang pesisir memiliki orientasi yang kuat untuk merebut dan meningkatkan kewibawaan atau status sosial. Mereka sendiri mengakui bahwa mereka cepat marah, mudah tersinggung, lekas menggunakan kekerasan, dan gampang cenderung balas-membalas sampai dengan pembunuhan. Orang pesisir merasa harga diri yang amat tinggi dan sangat peka. Perasaan itu bersumber pada kesadaran mereka bahwa pola hidup pesisir memang pantas mendapat penghargaan yang tinggi”[[16]](#footnote-17)

Dalam masyarakat sekarang untuk mencapai derajat kewibawaan dan status sosial atau penghormatan sosial, tentu harus memiliki modal sosial yang bisa dianggap masyarakat sebagai “nilai lebih” seseorang individu atau sekelompok masyarakat dibandingkan dengan yang lainnya. Nilai lebih itu bisa berupa kekayaan ekonomi dan pemilikan simbol-simbol keagamaan, seperti haji.[[17]](#footnote-18) Nelayan-nelayan yang mampu mendapatkan hasil tangkapan besar dan bisa cepat kaya dianggap oleh masyarakat kalau “bintangnya sedang naik”. Hal seperti ini diterima secara wajar., tanpa ada rasa iri hati. Kalau nasib mujur itu karena barokah seorang kiai, biasanya masyarakat akan mencari informasi agar bisa *nyabis* ke kiai tersebut. Namun demikian, nelayann yang mujur tersebut akan merahasiakan identitas kiai yang bersangkutan.

Di dalam kehidupan masyarakat nelayan, menjadi kaya atau miskin mendadak sudah biasa. Jatuh bangun dalam usaha perikanan tangkap sudah disertsi dengan kesiapan mental yang tinggi sehingga mereka tidak mengenal *post power syndrome*, seperti layaknya pejabat kita.[[18]](#footnote-19)

1. **Lembaga pendidikan**

Lembaga pendidikan formal (SD-SMP) di desa-desa pesisir atau desa nelayan merupakan tempat melakukan investasi ilmu pengetahuan yang hasilnya bisa dilihat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, jika sejak dini mata pelajaran pendidikan lingkungan pesisir-laut sudah diberikan kepada siswa-siswa, niscaya dalam masa 10-20 tahun mendatang kesadaran warga masya-rakat untuk menyelamatkat masa depan sumber daya pesisir-laut sudah meningkat dan meluas. Kondisi demikian akan mendukung kebijakan pemrintah jika kelak menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor utama dalam pembangunan bidang ekonomi atau dalam pembangunan nasional.

Mata pelajaran pendidikan lingkungan pesisir-laut terwadahi dalam kurikulum lokal. Untuk membentuk fondasi kesadaran mata pelajaran pendidikan lingkungan pesisir-laut diberikan kepada siswa SD-SMP secara bertahap. Tahap pertama mata pelajaran tersebut dapat diberikan pada siswa kelas III dan IV SD serta siswa kelas II SMP, minimal dalam satu semester. Selanjutnya, jika tahap pertama sudah mantap pelaksanannnya, tahap berikutnya dapat diperluas ke klas-klas yang lain dan jenjang pendidikan SMA. Susunan materi pelajaran ini diarahkan untuk mengembangkan wawasan ilmu pengatahuan siswa tentang esensi negara maritime atau negara kepulauan, kelestarian sumberdaya pesisir-laut, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pesisir, dan strategi pembangunan kawasan pesisir-laut. Substansi materi mata palajaran mencakup isu-isu sebagai berikut.

1. Wawasan nusantara dan hubungan kemasyarakatan antar pulau.
2. Struktur potensi sumber daya pesisir-laut sebagai modal pembangunan bangsa di masa depan.
3. Ekosistem pesisir-laut dan konservasi.
4. Fungsi hutan bakau dan terumbu karang bagi lingkungan.
5. Pencerahan potensi-laut.
6. Tanggung jawab masyarakat terhadap kelangsungan hidup sumber daya pesisir-laut.
7. Pariwisata pantai atau pariwisata bahari.
8. Nelayan, kegiatan penangkapan ikan, dan tegnologinya.
9. Pengolahan hasil tangkap.
10. Budidaya perikanan pantai dan rumput laut.
11. Jaringan pemasaran hasil-hasil laut (ikan dan nonikan).
12. Kebijakan pemerintah babupaten dalam membangun kawasan pesisir-laut.[[19]](#footnote-20)

**C. Pendidikan Islam**

**1. Pengertian Pendidikan Islam**

Secara umum pengertian pendidikan Islam juga belum memiliki rumusan yang disepakati oleh seluruh ahli pendidikan Islam. Dalam Konferensi Internasional Pendidikan Islam pertama (First World Conference on Muslim Education) yang diselenggarakan oleh King Abdul Aziz University Jeddah pada tahun 1977, belum merumuskan definifi yang jelas dan disepakati tentang pengertian pendidikan menurut ajaran Islam. Pada bagian rekomendasi, para peserta hanya membuat kesimpulan, bahwa pengertian atau definisi pendidikan menurut Islam adalah keseluruhan pengertian yang terkandung dalam istilah *ta’lim, tarbiyah dan ta’dib.*

Menurut Naquid al Attas, istilah *ta’adib* merupakan istilah yang paling tepat digunakan untuk menggambarkan ilmu pendidikan. Istilah *tarbiyah* menurut pendapatnya dianggap terlalu keras. Karena dalam pendidikan dalam istilah ini mencakup juga pendidikan untuk hewan. Istilah *ta’dib* menurut penjelasannya berasal dari kata kerja *adabun* yang berarti pengenalan dan pengakuan tentang hakekat bahwa pengetahuan dan wujud bersifat teratur secara herarkhis sesuai dengan berbagai tingkat dan derajat mereka.[[20]](#footnote-21) Selain itu, Al-attas mendefinisikan pendidikan (menurut Islam) sebagai pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia, tentang tempat-tempat yang tepat bagi segala sesuatu di dalam tatanan wujud sehingga hal ini membimbing kearah pengenalan dan pengekuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud tersebut.[[21]](#footnote-22) Sedangkan pendidikan Islam yang didefinisikan Ridha adalah*.* Menurutnya, pendidikan dalam islam itu adalah *al-ta’lim* yang merupakan proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu.[[22]](#footnote-23)

Menurut uraian diatas tentang pendidikan dan uraian yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung maka pendidikan Islam adalah proses bimbingan dari seseorang kepada orang lain agar ia berkembang secara maksimal, sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Sunnah serta pengembangan pemahaman kedua sumber tersebut berdasarkan kepada pikiran (*ra’yu*) dan ijtihad.

Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.[[23]](#footnote-24) Di dalam UUSPN No. 2/1989 pasal 39 ayat (2) ditegaskan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat, antara lain *pendidikan agama*. Dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa *pendidikan agama* merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.[[24]](#footnote-25)

**2. Media Pendidikan Islam**

**a. Masjid dan Pengaruhnya Terdadap Pendidikan**

Di dalam masjid, seluruh masjid dapat membahas dan memecahkan persoalan hidup, bermusyawarah untuk mewujudkan berbagai tujuan, menjauhkan diri dari kerusakan, serta menghadang berbagai penyelewengan akidah. Masjid tidak hanya menjadi tempat mereka behubungan dengan Pencipatnya dalam rangka memohon ketentraman, kekuatan dan pertolongan Allah. Di masjid, mereka mengisi hatinya dengan kekuatan spiritual yang baru sehingga Allah selalu menganugrahkan kesabaran, ketangguhan, kesadaran, kewaspadaan, serta aktifitas yang penuh semangat.[[25]](#footnote-26)

Demikianlah, manusia dididik di masjid-masjid dalam naungan masyarakat Islam yang tinggi dan mengutamakan musyawarah dalam penyeleseian masalahnya. Jamaah yang sakit, mereka tengok dan fakir miskin yang membutuhkan petolongan, mereka beri riski yang mereka terima dari Allah. Maka, jadilah mereka masyarakat kuat yang berpartisipasi dalam pendidikan dan pembangunan umat.[[26]](#footnote-27) Sangatlah jelas sekali pendidikan dalam masjid tidak hanya membahas tentang agama, akan tetapi juga membahas permasalahan dalam kehidupan yang mengutamakan kebersamaan yang dan sifat humanistik yang tinggi. Dari sisi lain penilaian orang awam bahwa masjid hanya tempat sholat dan tempat membahas tentang kitab dan permasalahan agama, akan tetapi banyak hal yang dapat dilakukan di masjid.

**b**. **Rumah dan Pengaruhnya Terdadap Pendidikan**

Pada dasarnya, masjid itu menerima anak-anak setelah mereka dibesarkan dalam lingkungan keluarga, dalam asuhan ornag tuanya. Dengan demikian, rumah tangga muslim adalah benteng utama tempat anak-anak dibesarkan melalui pendidikan Islam. Yang dimaksud dengan keluarga muslim adalah keluarga yang mendasarkan aktivitasnya pada pembentukan keluarga sesuai dengan syariat Islam.[[27]](#footnote-28) Tujuan pendidikan dalam rumah tangga ialah agar anak mampu berkembang secara maksimal. Itu meliputi seluruh aspek perkembangan anaknya, yaitu jasmani, akal, dan rohani. Tujuan lain ialah membantu sekolah atau lembaga kursus dalam mengembangkan pribadi anak didiknya.

Yang bertindak sebagai pendidik dalam pendidikan dalam rumah tangga ialah ayah dan ibu si anak serta semua orang yang merasa bertanggung jawab terhadap perkembangan anak itu seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan kakak. [[28]](#footnote-29) Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terhadap dalam kehidupan keluarga. Orang tua memegang peranan penting dalam pendidikan anak-anaknya. Sejak anak dalam kandungan, setelah lahir sampai dengan dewasa masih perlu bimbingan sehingga bisa disimpulkan penentu pertama adalah ayah dan ibu.[[29]](#footnote-30) Bila di rumah terdapat tidak hanya ayah dan ibu (ada kekek dan nenek, misalnya), maka kebijakan pendidikan yang dipegang mereka seharusnya satu; tidak boleh terjadi terjadi kebijakan yang paling berlawanan. Biasanya kebijakan kakek-nenek sering berbeda dari kebijakan ayah dan ibu.[[30]](#footnote-31)

Pendidikan dalam rumah tangga tidak beda jauh seperti pendidikan pada sekolah, pendidikan dalam rumah tangga ada yang namanya kurikulum, akan tetapi kurikulum dalam pendidikan rumah tangga tidak tegas seperti kurikulum di sekolah. Kurikulum pendidikan rumah tangga hanya garis besar saja, antara lain yaitu: kurikulum untuk pengembangan jasmani dan keterampilan, kurikulum untuk pengembangan akal, kurikulum untuk pengembanhan rohani anak. Kurikulum pada pendidikan keluarga hanya mengacu kepada teori tentang aspek-aspek kepribadian dalam garis besar.

Dilihat dari ajaran Islam, anak adalah amanat Allah. Amanat wajib dipertanggung jawabkan. Jelas, tanggung jawab orang tua terhadap anak tidaklah kecil. Secara umum inti tanggung jawab itu ialah penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak dalam rumah tangga. Tuhan memerintahkan agar setiap orang tua menjaga keluarganya dari siksa neraka;

قُوْااَ نْفُسَكُمْ وَاَ هْلِيْكَيمْ نَارًا…..

Artinya: jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka.

Jadi, tanggung jawab itu pertama-tama adalah sebagai suatu kewajiban dari Allah; kewajiban harus dilaksanakan.

Kewajiban itu dapat dilakukan dengan mudah danwajar karena orang tua memang mencintai anaknya. Ini merupakan sifat manusia yang dibawanya sejak lahir. Manusia mempunyai sifat mencintai anaknya. Ini terlibat dalam surat al-Kahfi ayat 46:

المَا لُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةَ احَيوةِالدُ نيَا.....

Artinya: harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia.

Dalam ayat ini di jelaskan bahwa manusia membawa sifat menyenangi harta dan anak-anak. Bila orang tua memang telah mencintai anaknya, maka tentulah ia tidak akan sulit mendidik anaknya, dengan jelas diterangkan pada Q.S. al-Furqan ayat 74 yang berbunyi:

Artinya: dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

Boleh bangga bila anak kita memang hebat, itu adalah karena cinta pada anak, tetapi jangan berlebihan, cukup di dalam hati saja. Itu wajar. Cinta kepada anak jangan hendaknya menyebabkan lupa kepada Allah; cinta kepada Allah dan Rasulnya harus melebihi cinta kepada apa pun. Jika memang cinta kepada anak, didiklah anak sebaik-baiknya, sedini mungkin.[[31]](#footnote-32)

Mengingat uraian di atas, maka secara sederhana tujuan pendidikan anak di dalam keluarga ialah agar anak itu menjadi anak yang saleh. Anak yang saleh itulah anak yang wajar dibanggakan. Tujuan lain adalah sebaliknya, yaitu agar anak menjadi musuh orang tuanya, yang akan mencelakakan arang tuanya.[[32]](#footnote-33)

**c. Sekolah dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan**

Di dalam UUSPN No. 2/1989 pasal 39 ayat (2) ditegaskan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat, antara lain *pendidikan agama* merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.[[33]](#footnote-34) Di dalam GBPP PAI di sekolah umum, dijelaskan bahwa pendidikan agama islam adalah usaha sadar menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragam dalam masyarakat untuk mewujudkan peserta nasional.[[34]](#footnote-35) Namun, peran agama tetap utama dan sistematis karena bagaimana pun segala penyerapan pengetahuan pada diri anak harus tetap berpedoman pada konsep pendidikan yang bertujuan menghambakan diri kepada Allah dan memiliki materi atau perilaku yang membawa manusia pada penyerahan diri terhadap syariat Allah yang ditirunkan kepada Rasul-Nya serta dipelihara dan diamalkan oleh generasi sesudahnya.[[35]](#footnote-36)

Usaha pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah diharapkan agar mampu membentuk kesalehan pribadi dan sekaligus kesalehan sosial sehingga pendidikan agama diharapkan jangan sampai: (1) menumbuhkan semangat fanatisme; (2) menumbuhkan sikap intoleran di kalangan peserta didik dan masyarakat Indonesia; dan (3) memperlemah kerukunan hidup beragama serta persatuan dan kesatuan nasional. Walhasil, pendidikan agama Islam diharapkan mampu menciptakan mampu menciptakan *ukhuwah Islamiyah* dalam arti luas, yaitu, *ukhuwah fi al-‘ubudiyah, ukhuwah fi-insaniyah, ukhuwah fi al-wathaniyah wa al-nasab,* dan *ukhuwah fi din al-Islam.[[36]](#footnote-37)* Karena itu, pembelajaran pendidikan agama Islam diharapkan mampu mewujudkan ukhuwah islamiyah dalam arti luas tersebut. Sugguhpun ,masyarakat berbeda-beda agama, ras, etnis, tradisi, dan budaya, tetapi nagaimana melalui keragaman ini dapat dibangun suatu tatanan hidup yang rukun, damai dan tercipta keberagaman hidup serta toleransi yang dinamis dalam membangun bangsa Indonesia.[[37]](#footnote-38) Oleh karena itu, betapa penting pendidikan agama Islam dalam pembelajaran pada pendidikan formal dari tingkat SD (sekolah dasar), SMP (sekolah menengah pertama), dan SMA (sekolah menengah akhir). Akan tetapi pendidikan agama Islam menurut siswa SMA dianggap mata pelajaran yang tidak terlalu terpengaruh dalam tuntutan akademik. Sebab, siswa usia SMA merasa PAI adalah mata pelajaran yang bersifat formalitas bagi siswa beragama Islam, apalagi keluarga yang kurang mengetahui betapa pentingnya pendidikan agama dalam perkembangan anak, kerena itu orang tua cenderung memberikan pelajaran yang sifatnya tuntutan akademik seperti bahasa Inggris, metematika, fisika dan sebagainya. Keluarga yang kurang mengkaji ilmu agama (Islam) kurang disadari bahwasannya ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi keserasia, keselarasan dan keseimbangan antara:

1. Hubungan manusia dengan Allah SWT.
2. Hubungan manusia dengan sesama manusia
3. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri
4. Hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungan.

Secara garis besar bahwa dapat dikatakan pengajaran pendidikan agama Islam di sekolah mempunyai target antara lain:

1. Siswa taat beribadah, berdzikir, berdo’a serta mampu menjadi iman.
2. Siswa mampu membaca al-Qur’an dan menulisnya dengan benar serta memahami kandungan makna, terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknoligi (IPTEK).
3. Siswa memiliki kepribadian muslim (berakhlak mulia)
4. Siswa mamahami, menghayati dan mengambil manfaat Tarikh Islam.
5. Siswa mampu menerapkan prinsip-prinsip muamalah dan syari’ah Islam dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[[38]](#footnote-39)

**3. Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Pendidikan**

Tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan anak-anak ada dalam beberapa perkara dan cara yang dipandang merupakan metode pendidikan masyarakat yang utama. Adapun cara yang yang terpenting adalah:

*Pertama*, masyarakat adalah peran utama dalam suatu pendidikan, Allah menjadikan masyarakat sebagai penyuruh kebaikan dan pelarang kemunkaran sebagai diisyaratkan Allah dalam firman-Nya:

Artinya: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (ali Imran :104)

Berdasarkan ayat tersebut, kewajiban bagi pembimbinga anak adalah menjaga fitrah anak tetap dalam kesucian dan terhindar dari berbagai penyelewengan atau kehinaan. Penjagaan fitrah anak berarti menyiapkan generasi yang suci.

*Kedua*, dalam masyarakat Islam, seluruh anak-anak dianggap anak sendiri atau anak saudaranya sehingga ketika memanggil seorang anak, siapapun dia, mereka akan memanggil dengan “Hai anak saudaraku”; dan begitu pula sebaliknya, setiap anak-anak atau remaja akan memanggil setiap orang tua dengan panggilan, “Hai paman!” hal itu terwujud berkat pengalaman firman Allah dalam surat **al-Hujurat: 10**: Sesungguhnya orang-orang muknin adalah bersaudara…” semenjak terbitnya fajar Islam, kaum muslimin telah merasakan tanggung jawab bersama untuk mendidik generasi muda.

*Ketiga,* untuk menghadapi orang-orang yang membiasakan dirinya berbuat buruk, Islam membina mereka melalui salah satu cara membina dan mendidik manusia, yaitu kekerasan atau kemarahan karena Rasulullah saw. sendiri telah menjadikan masyarakat sebagai sarana membina seseorang.[[39]](#footnote-40)

*Keempat,* masyarakatpun dapat melakukan pembinaan melalui pengisolasian, pembaikotan, atau pemutusan hubungan kemasyarakatan. Cara itu merupakan isyarat bahwa dalam pembinaan generasi muda, isolasi merupakan cara yang efektif untuk menghukum mereka dan itu merupakan pencegahan terhadap agar sikap pemuda yang menyeleweng itu tidak menular kepada pumuda lain. Yang terpenting dari sikap isolasi itu adalah tercapainya tujuan bahwa generasi muda yang bersalah telah mengakui kesalahannya, menyesal, bertobat, dan kembali kepada kebenaran.[[40]](#footnote-41)

**4. Tujuan Pendidikan Islam**

Dalam setiap kegiatan, idealnya tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu. Dengan demikian, ruang lingkup kegiatan yang tanpa disertai tujuan, sasarannya akan kabur dan tidak jelas. Akibat program dan kegiatannya sendiri menjadi tidak teratur. Selain itu tujuan juga merupakan parameter keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan.[[41]](#footnote-42) Tujuan juga dapat dijadikan motivasi untuk melakukan kegiatan sehingga untuk melakukan kegiatan lebih totalitas sehingga hasil yang dicapai bisa maksimal, itu semua berlaku untuk semua jenis kegiatan seperti dalam dunia kerja ataupun untuk menutut ilmu. Dalam dunia keilmuan yang khususnya pendidikan Islam ada tujuan yang diklasifikasikan menjadi empat macam, antara lain:

1. Tujuan pendidikan jasmani (*al-Ahdat al-jismiyah*)

Tujuan ini digunakan untuk mempersiapkann diri manusia sebagai pengemban tugas kholifah di bumi melalui pelatihan ketrampilan-ketrampilan fisik atau memiliki kekuatan dari segi fisik (*al-Qawi*)

1. Tujuan pendidikan rohani (*al-Ahdat al-Ruhaniyah*)

Tujuan ini bermadsud untuk meningkatkan jiwa kesetiaan kepada Allah semata-mata dan melaksanakan moralitas islami yang diteladani oleh Rasulullah dengan berdasarkan pada cita-cita dalam al-Qur’an.

1. Tujuan pendidikan akal (*al-Ahdat al-aqliyah*)

Pengarahan intelegensi untuk menemukan kebenaran dan sebab-sebabnya dengan telaah tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga dapat menumbuhkan iman kepada sang pencipta dan selalu ingat pada kuasa-Nya.

1. Tujuan pendidikan sosial (*al-Ahdat al-ijlima’iyah*)

Tujuan pendidikan sosial adalah pembentukan kepribadian yang utuh dari subtansi fisik dan psikis manusia. Identitas individu di sini tercermin sebagai manusia yang hidup pada masyarakat heterogen.[[42]](#footnote-43)

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berkesadaran dan bertujuan, Allah telah menyusun landasan pendidikan yang jelas bagi seluruh manusia melalui syariat Islam. Konsep ketinggian dan keuniversalan pendidikan Islam harus dipahami sebelum kita beranjak pada metode dan kerakteristik pendidikan tersebut. Pengkajian alam semesta yang disertai pemahaman atas kejelasan landasan dan tujuan penciptaannya akan memperkuat keyakinan dan keimanan amnesia atas keberadaan Allah.

Allah menciptakan manusia denga tujuan untuk menjadi khalifah di muka bumi melalui ketaatann kepada-Nya. Untuk mewujudkan tujuan itu, Allah memberikan hidayah serta berbagai fasilitas alam semesta kepada manusia. Artinya, manusia dapat memanfaatkan alam semesta ini sebagai sarana merenungi kebesaran Penciptanya. Hasil perenungan itu memotivasi manusia untuk lebih manaati dan mencintai Allah.[[43]](#footnote-44)

1. **Fungsi Pendidikan Islam**

Suatu keharusan bagi penddidikan Islam melakukan rekonstruksi pada kerangka orientasi budayanya. Rekonstruksi yang dilakukan tidak harus berakibat pada terpolanya pendidikan islam pada suatu visi yang ekstrim. Pemikiran yang semacam ini sudah barang tentu tidak akan memberikan kerangka pendekatan yang dapat menjembatani kepentingan pendidikan Islam dalam memberikan acuan nilai di tengah-tengah perkembangan masyarakat. Oleh kerena itu, fungsi imperative intuk memperkokoh jati diri kemanusiaan dengan mengacu pada nilai-nilai kemutlakan (absolut) sangat penting dijadikan orientasi utama bagi pendidikan Islam. Disamping itu, pendidikan Islam herus terus menerus bersikap terbuka dalam arus utama perubahan sosial. Dengan penekanan orientasi tersebut, akan dihasilkan makna ganda sekaligus. Terjadi kekokohan pribadi sebagai hasil dari akumulasi nilai dalam pendidikan Islam. Secara resultan hal ini akan mendatangkan makna berikutnya berupa adanya kemampuan untuk menginduksi tuntutan perubahan sosial dengan tetap berpijak pada kerangka nilai (value juggement) yang Islami. Bertolak dari kepentingan demikian, ada dua fungsi pendidikan Islam yang harus dilakukan pertama, fungsi normative, dan kedua fungsi progresif dinamis.

Pada fungsi pertama, pendidikan terbatas pada proses alih nilai (transferensi) sesuai dengan referensi nilai sebelumnya. Fungsi ini lebih menekankan pada fungsi tradisional sebagai konservator budaya. Penanaman nilai ini diarah tujukan pada terbentuknya nilai dasar umum, yang selanjutnya secara akan dapat mengembangkan nilai-nilai lainya yang relevan.

Dengan menggunakan terminologi yang dibuat Thomas Kuhn, Jujun S. Sumantri, menyebut nilai-nilai dasar ini dengan paradigma; suatu konsep dasar yang dianut oleh masyarakat. Dalam kerangka ini, maka kegiatan pendidikan Islam secara dasar harus mengandung muatan nilai baru yang selanjutnya dikembangkan secara terarah dan sistematik melalui pendekatan yang relevan.[[44]](#footnote-45) Dalam beberapa kasus, dalam lembaga pendidikan Islam masih banyak dijumpai ketimpangan pada segi penggunaan metodologi. Lembaga pendidikan Islam selama ini masih didominasi oleh pendekatan indokrinasi yang menjurus pada perkembangannya sikap dogmatis yang eksklusif dan ekstrim. Kenyataan ini tidak bisa dilepaskan dari perfosa keagamaan yang ada, yang masih bertahan dalam status quo ortodoksi keberagamaan.seharusnya semangat keagamaan dengan terus-menerus melakukan suatu refleksi kritis dalam mencari makna keberagaman dalam konteks kehidupan sosio cultural diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam wilayah kependidikan.[[45]](#footnote-46)

Fungsi kedua yang perlu dikembangkan adalah fungsi progresif-dinamis pendidikan. Pengembangan fungsi ini sebagai konsekuensi pendidikan Islam sebagai system yang terbuka (open system), yang harus bersikap terbuka dan bergumul dalam utama perubahan masyarakat, dengan posisi tersebut, adalah mustahil jika pendidikan Islam akan menutup dirinya kalau tidak ingin pendidikan Islam mengalami aliensi sosial dan kultural.[[46]](#footnote-47) Dalam fungsi yang kedua tersebut, pendidikan Islam tidak lagi sebagai konservator budaya, tapi diarahkan pada aktualisasi budaya dengan cakupan budaya yang lebih luas. Artinya, pendidikan Islam tidak hanya mencerminkan sebagai keadaan kebudayaan, tapi sebagai medium yang dapat mendinamiskan perubahan dan mengembangkan kebudayaan agar mencapai kemajuan.[[47]](#footnote-48)

**D. Pendidikan Nonformal**

1. **Pengertian Pendidikan Nonformal**

Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik dilembaga maupun tidak. Penyelenggaraan kegiatan PNF lebih terbuka, tidak terikat, dan lebih terpusat. Program pendidikan nonformal dapat merupakan lanjutan atau pengayaan dari bagian program sekolah, pengembangan dari program sekolah, dan program yang setara dengan pendidikan sekolah.[[48]](#footnote-49) Adapun beberapa definisi tantang pendidikan nonformal yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

1. Pendidikan nonformal adalah usaha yang terorganisir secara sistematis dan kontinu di luar system persekolahan, melalui hubungan sosial untuk membimbing individu, kelompak dan masyarakat agar memiliki sikap dan cita-cita sosial (yang efektif) guna meningkatkan taraf hidup dibanding materiil, sosial dan mental dalam rangka usaha mewujudkan kesejahtaraan sosial.
2. Secara luas Coombs memberikan rumusan tentang pendidikan nonformal adalah: setiap pendidikan yang terorganisasi, diselenggarakan diluar pendidikan persekolahan, diselenggarakan secara tersendiri atau merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih luas dengan maksud memberikan layanan khusus kepada warga belajar di dalam mencapai tujuan belajar.
3. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan sosial dalam hal ini adalah semua kegiatan pendidikan termasuk didalamnya pendidikan olah raga dan rekreasi yang diselenggarakan diluar sekolah bagi pemuda dan orang dewasa, tidak termasuk kegiatan-kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan kurikulum sekolah.

Dari devinisi-devinisi tersebut, bahwa pendidikan nonformal dalam proses penyelenggaraannya memiliki suatu sistem yang terlembagakan, yang didalamnya terkandung makna bahwa setiap pengembangan pendidikan nonformal perlu perencanaan program yang matang, melalui kurikulum, isi program, sarana, prasarana, sasaran didik, sumber belajar, serta faktor-faktor yang satu nama lain tak dapat dipisahkan dalam pendidikan nonformal.[[49]](#footnote-50)

Dalam kerangka analisis itu juga dimasukkan suatu pandangan yang luas dan fungsional mengenai pendidikan, yakni pandangan yang tidak hanya melihat pendidikan itu sebagai “persekolahan” tetapi pendidikan adalah **belajar,** tanpa terlalu mempersoalkan dimana dan bagaimana belajar itu dilakukan. Berdasar pandangan ini, pendidikan itu jelas merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang hayat, dan bentuknya berbeda-beda, yang salah satunya adalah persekolahan. Kebanyakan dari apa yang dipelajari seorang dalam seluruh kehidupannya itu diterima melalui pendidikan informal yakni, melalui pengalaman dan interaksi keseharian dengan orang-orang tertentu di lingkungan sosial maupun pekerjaan.

Pendidikan nonformal yang kami maksudkan di sini adalah beraneka warna bentuk kegiatan pendidikan yang terorganisasi atau setengah terorganisasi yang berlangsung di luar sistem persekolahan; yang di tunjukkan untuk melayani sejumlah besar kebutuhan belajar dari berbagai kelompok penduduk, baik tua maupun muda. Beberapa pendidikan nonformal itu ada yang pada hakikatnya menjadi pengganti pendidikan formal, yakni memberikan pelajaran yang sama seperti yang di lakukan oleh sekolah. Contoh pendidikan nonformal semacam ini ialah “second chance” di Thailand, program korespondensi radio “school Equivalency” di Kenya, Pusat Pendidikan Pedesaan di Upper Volta, program-program ACPO di Kolombia, dan program-program keaksaraan fungsional di negara-negara seperti Mali, atau Thailand. Di Indonesia program semacam ini adalah program Paket A.

Namun, kebanyakan program pendidikan nonformal yang diliput dalam studi kasus ini di arahkan pada pelayanan kebutuhan belajar yang penting dan yang memberi keuntungan kepada warga belajarnya yang pada umumnya tidak di sajikan oleh pendidikan formal.

Kebutuhan-kebutuhan belajar itu misalnya yang berhubungan dengan kesehatan, nutrisi, keluarga berencana, dan persyaratan-persyaratan lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan mutu kehidupan keluarga, mengembangkan perilaku pribadi yang baik dan sikap yang positif, meningkatkan produktifitas perekonomian, penghasilan keluarga, dan kesempatan kerja, serta memperkuat lembaga-lembaga swasembada dan swakarsa atau memperluas partisipasi pada lembaga tersebut. Sebagian besar, program-program itu di tunjukan untuk membantu kelompok-kelompok tertentu, misalnya para petani kecil, para tukang, dan para pengusaha, para wanita, anak-anak balita (melalui ibu-ibu mereka), pemuda-pemuda putus sekolah yang menganggur, kelompok tani, dan semacamnya.

Hal ini tidak membawa kesan bahwa pendidikan nonformal itu hanya di peruntukkan bagi penduduk yang miskin dan tidak bersekolah dan untuk daerah pedesaan. Sebetulnya, pendidikan nonformal itu tersebar luas juga di berbagai kota yang telah maju industrinya. Di antara fungsi lainnya, pendidikan nonformal memberi jalan yang penting dengan mana orang-orang yang berpendidikan tinggi para dokter medis, ilmuan, insinyur, dan para profesional lainnya dapat tetap mengikuti perubahan yang cepat dalam bidang mereka masing-masing. Pendidikan nonformal secara luas juga dipergunakan oleh para pelajar sekolah menengah dan para dan para mahasiswa untuk memperluas wawasan budaya dan pengetahuan umum dalam kehidupan mereka.

Pendidikan formal dan nonformal, kebalikan dari kesan yang tampak, tidaklah bertentangan. Hendaknya mereka dilihat sebagai partner yang saling mengisi dan menguatkan. Keduanya penting, walaupun bentuknya berbeda, bersatu dalam suatu “sitem belajar sepanjang hayat” yang menyeluruh dan bertautan, yang dapat melayani semua anggota masyarakat dalam menjawab kebutuhan mereka yang berkembang dan berubah.[[50]](#footnote-51)

1. **Program Pendidikan Nonformal**

Berdasar kepada kondisi-kondisi tersebut program pendidikan nonformal dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yakni:

1. Program pendidikan dasar, yang memberikan pelayanan belajar kepada masyarakat yang belum memiliki kemampuan-kemampuan dasar, seperti program literasi (kesanggupan membaca dan menulis).[[51]](#footnote-52) Kemampuan dasar adalah hal yang pokok dan harus dikuasai untuk menjadi individu yang berkompetensi sehingga dapat dikatakan masyarakat yang sejahtera. Pendidikan nonformal selain untuk pengembangan dalam kehidupan dalam masyarakat juga guna membantu pendidikan formal.

Adapun pendidikan nonformal untuk membantu pendidikan formal ialah:

1. Pendidikan anak usia dini
2. Lembaga bimbingan belajar atau lebih dikenal dengan kursus, LBB ini sangat membantu anak dalam memahami ilmu pengatahuan yang diajarkan dalam pendidikan formal. Penyelenggaraan ini diadakan oleh individu yang mempunyai kemampuan dan tak jarang dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan.
3. Program keaksaraan, atau yang dahulu dikenal dengan program pembe-rantasan buta huruf, selalu ada di negara manapun, termasuk negara adidaya sekalipun, meskipun bentuk dan kriterianya berbeda.[[52]](#footnote-53)
4. Pembelajaran ilmu agama, pembelajaran ini diselenggarakan oleh masyarakat untuk menambah khasanah dalam bidang agama. Pembelajaran pendidikan agama ini berada dalam suatu lembaga, lembaga pembelajaran tersebut antara lain yaitu: *pertama* yaitu Masjid, karena pendidikan Islam erat sekali hubungannya dengan masjid. Masjid, di samping untuk tempat beribadah, juga sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dan pengetahuan Islam, yang materi pelajarannya meliputi: kaidah-kaidah Islam, hukum-hukum agama.[[53]](#footnote-54)

Masjid merupakan salah satu tempat mengabdi para ulama’ di samping madrasah, pesantren, dan sekolah dengan system klasik. Hal ini disebabkan tiap-tiap pemeluk Islam, baik dia seorang awam, santri maupun ulama’ melaksanakan sholat lima waktu dan tabligh umum di masjid.[[54]](#footnote-55)

*Kedua* adalah Pesantren. Secara teknis pesantren adalah “tempat di mana para santri tinggal”. Frasa ini merupakan gambaran paling penting dari pesantren, yaitu sebagai suatu lingkungan pendidikan dalam penger-tiannya menyeluruh. Pesantren mirip dengan akademik militer atau biara dalam arti bahwa mereka berada di sana mengalami suatu kondisi totalitas.[[55]](#footnote-56) Secara umum, pondok pesantren dikelompokkan menjadi dua, yaitu pesantren *salafi* dan *khalafi.* Pesantren salafi secara murni masih mempertahankan pengajaran kitab-kitab kuning dalam seluruh aktifitas belajar mengajarnya, dan metode yang dipakai masih sangat tradisional. Sedangkan pesantren khalafi, di samping masih mempertahankan pengajaran kitab kuning sebagai ciri khasnya, juga telah memasukkan materi pelajaran umum dan tentunya dengan memakai system sekolah sebagai system yang lebih modern.[[56]](#footnote-57)

*Ketiga* yaitu Madrasah, setelah mengalami perkembangan dan untuk memperdalam pengajian maka dibentuk lembaga pendidikan yang memakai sistem klasikal/ madras diniyah, sebagai berikut:

* Tingkat pertama; mengenal huruf dalam mempelajari/ pendidikan akhlak/ bacaan (tajwid)
* Tingkat menengah; memahami pelajaran al-Qur’an dan hadits kemurnian cara peribadatan, cara pembacaan, cara pengertian dan cara terjemahannya.
* Tingkat ketiga; di asrama secara penuh, menerima pelajaran hingga selesei pada waktu yang ditentukan menurut pelajaran-pelajaran yang akan dipelajari, kalau al-Qur’an penuh kalau hadits juga penuh.[[57]](#footnote-58) Dan lain sebagainya.

1. Program pendidikan lanjutan, yang memberikan pelayanan pendidikan untuk pengembangan dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti; pendidikan untuk peningkatan produktivitas kerja.[[58]](#footnote-59) Pendidikan peningkatan produktivitas kerja ini guna menjadikan output yang aktif, kreatif, inofatif dan tentunya lebih produktif. Adapun pendidikan untuk meningkatkan produktivitas suatu masyarakat adalah:
2. Pendidikan kepemudaan, yaitu untuk menyalurkan bakat pemuda dalam masyarakat.
3. Pendidikan pemberdayaan perempuan, mayoritas perempuan dalam keluarga hanya mengurusi bagian dapur, oleh karena itu diadakan pemberdayaan perempuan untuk memberi keterampilan pada perempuan yang sudah menikah maupun belum menikah untuk mempunyai ketrampilan yang lebih.
4. Pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan ketrampilan ini diselenggarakan untuk masyarakat yang siap kerja dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dengan diadakan pelatihan kerja supaya hasil kerja bisa maksimal dan mengetahui resiko yang dihadapinya, karena dalam dunia kerja dalam masyarakat pedesaan seperti: tukang (kayu, bangunan, dan sebagainya), petani, nelayan mereka cara belajarnya hanyalah otodidak.

Program yang berhubungan dengan pekerjaan yang paling tua adalah *magang,* yang di Indonesia dikenal dengan ngernet atau menjadi kernet. Kegiatan ini sederhana, tetapi sangat efektif karena langsung ada dalam situasi belajar sambil bekerja. Dari segi waktu sangat bergantung pada tingkat kesulitan kerjanya dan keberanian pendidiknya untuk melepaskan pemagang mandiri. Ini contoh magang yang paling tua seperti kernet tukang kayu, tukang batu, pandai besi, dan montir. Namun belakangan, setelah itu ada magang yang ditentukan waktunya oleh karena peserta didiknya merupakan titipan dari sekolah atau universitas, seperti magang di perusahaan dan di kantor-kantor pemerintah, mereka ditentukan waktunya dan penempatannya di bagian-bagian yang ingin dipelajari karena magang tersebut merupakan bagian dari program lain. Hal ini berada dengan magang secara konvensional yang dilakukan secara mandiri dan serta tidak terikat dengan program lain.[[59]](#footnote-60)

1. **Konsep Pendidikan Nonformal**

Sebuah kerangka pembelajaran dengan hasil yang maksimal dan penerapan yang efektif untuk pembelajaran perlu adanya sebuah konsep yang matang. Sebagai konsep dasar pendidikan nonformal (PNF) perlu kita ketahui dengan alasan sebagai konsep dasar sangat diperlukan, sebab merupakan *kerangka umum* untuk menganalisis atau sebagai cara menerangkan fenomena-fenomena pendidikan yang terjadi di masyarakat.[[60]](#footnote-61) Adapun beberapa konsep dalam pendidikan masyarakat sebagai berikut:

1. Konsep dasar yang pertama

Pendidikan dipandang sebagai proses belajar sepanjang hayat manusia. Artinya, pendidikan merupakan upaya manusia untuk mengubah dirinya ataupun orang lain selama ia hidup. Pendidikan hendaknya lebih dari sekedar masalah akademik atau perolehan pengatahuan, *skill* dan mata pelajaran secaca konvensional, melainkan harus mencakup sebagai kecakapan yang diperlukan untuk menjadi manusia lebih baik. Karena itu, pendidikan hendaknya meliputi ketrampilan kerumah tanggaan (*house hold skill*), apresiasi terhadap astetika (*easthetic appreciation*), berfikir analitik (*analytic thinking*), pembentukan sikap (*formation of attitude*), pembentukan nilai-nilai dan aspirasi (*formation of values and aspiration*), dan informasi tentang berbagai hal dalam kehidupan (*information of any sotrs*).[[61]](#footnote-62) Bahwasannya pendidikan itu adalah proses berkelanjutan dalam taraf mendapat pelajaran dalam kehidupan, dari lembaga, masyarakat maupun dari alam. Proses pendidikan dimulai sejak ada dalam dunia atau sejak lahir sampai dewasa hingga sampai akhir hayat.

1. Konsep dasar yang kedua

Konsep dasar yang kedua adalah kebutuhan belajar minimum yang esensial (*minimum essential learning needs*). Yang dimaksud dengan *kebutuhan belajar* disini adalah sesuatu yang harus diketahui dan dapat dikerjakan oleh anak-anak, laki-laki maupun perempuan, sebalum mareka merasa bartanggung jawab sebagai seorang dewasa. Setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan paket minimum berupa pengetahuan, *skill* dan sikap untuk menjadi manusia dewasa yang efektif dan mamuaskan. Dalam hal ini, kriterianya akan berada antara masyarakat yang satu dengan yang lain, wilayah yang satu dengan yang lain.

Ada enam unsur yang disarankan oleh Coombs sebagai paket minimum: (1) sikap positif terhadap kerja sama dan membantu keluarga serta anggotanya, terhadap masyarakat, terhadap pembangunan bangsa, dan terhadap nilai-nilai etis; (2) keaksaraan fungsional yang meliputi membaca dengan faham artinya, menulis dengan huruf yang benar, meminta informasi, dan menghitung hal-hal yang umum; (3) cara pandang ilmiah dan pemahaman sederhana tetang proses-proses alamiah, seperti terhadap kesehatan, nutrisi, lingkungan dan perlindungan terhadapnya; (4) pengetahuan dan *skill* fungsional untuk mengasuh keluarga dan menjalankan suatu rumah tangga; (5) pengetahuan dan ketrampilan fungsional untuk mencari nafkah; bukan hanya *skill* guna memasuki suatu pekerjaan lokal, tetapi juga untuk pertanian dan di luar pertanian; (6) pengatahuan dan ketrampilan fungsional untuk berperan serta sebagai warga Negara, seperti pemahaman sejarah, struktur dan fungsi pemerintahan, pajak, pendapatan, layanan-layanan sosial yang tersedia, dan sebagainya.

1. Konsep dasar yang ketiga

Proses pertumbuhan manusia dalam masyarakat transisi memerlukan layanan guna membantu pertumbuhan individu secara efektif. Perjalanan anak menuju proses dewasa melalui beberapa tahapan masa balita (*invancy and early childhood*), masa kana-kana (6-12 tahun) yang terkait dengan kebutuhan akan sekolah dasar, masa remaja (13-18 tahun) yang terkait dengan kebutuhan sekolah menengah, dan pasca remaja atau dewasa awal (19-24 tahun) terkait dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan tinggi atau sekolah menengah.[[62]](#footnote-63) Dalam proses pendewasaan diri terkait pendidikan untuk sebuah bekal kehidupan yang dikategorikan dalam usia, usia memang sangat menentukan proses berkembangnya intelektual dalam individu. Akan tetapi usia remaja sangatlah labil dalam proses kehidupan, lebih-lebih mengikuti *ternd* atau mengenal modernisasi dan westernisasi. Maka proses pendidikan disisi lain akan menghambat dan berkembang cepat sesuai dengan kerekter individu tersebut.

1. Konsep dasar yang keempat

Konsep dasar yang keempat terkait peran pendidikan dalam pengembangan pedesaan. Para pakar telah banyak menulis tentang pembangunan nasional menyeluruh, terutama tentang pertumbuhan ekonomi. Namun, pada umumnya mereka mengabaikan pentingnya bagian pembangunan nasional yang terjadi di wilayah pedesaan. Hampir semua negara sedang berkembang ditandai dengan kesulitan ekonomi dan dualisme sosial, yaitu dualisme antara sektor perkotaan yang modern dan sektor pedesaan yang tradisional. Meskipun dalam perencanaan nasional prioritas diletakkan pada perkembangan pedesaan, semua negara berkembang memprioritaskan dana perkembangannya pada pembangunan kota, dengan mendasarkan diri pada teori bahwa kemajuan di kota akan memberiakan *tetesan* ke daerah pedesaan (*progress in the cities would eventually trickle down to the rural areas*). Kenyataannya, dampak tersebut sangatlah lemah bahkan timbul kesenjangan antara desa dan kota.[[63]](#footnote-64)

Harus ditekankan di sini bahwa pendidikan saja tanpa adanya faktor perlengkapan lainnya tidak akan dapat dengan sendirinya menimbulkan keberhasilan pembangunan pedesaan. Pendidikan hendaknya dipandang sebagai salah satu *input* yang diperlukan bagi pembangunan pedesaan. Dampaknya tidak hanya bergantung pada kualitas relevansi pendidikannya, melainkan pada interaksinya dengan *input* komplementer lainnya, sebagaimana halnya produktivitas bergantung pada ada dan tidak adanya *input* pendidikan yang memadai. Pembangunan pedesaan tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang terisolasi dari pembanguanan nasional. Suatu kesalahan besar apabila kita menganggap bahwa kemajuan ekonomi perkotaan akan dapat meme-cahkan masalah-masalah pedesaan.[[64]](#footnote-65) Hal itu akan sulit diterima karena masyarakat perkotaan dan pedesaan sangat lah sulit untuk menjadi perbandingan. Suatu daerah dapat dikatakan sejahtera apabila dilihat dari sudut yang terkecil lebih dahulu. Kemajuan ekonomi, intelektual dan sebagainya dalam suatu wilayah lebih efektif dinilai dari pedesaan ke perkotaan.

1. **Masyarakat Sebagai Sumber dan Sasaran Pendidikan Nonformal**
2. **Masyarakat Sebagai Sumber Belajar**

Faktor lingkungan masyarakat banyak memberikan pengaruh kuat dalam pengembangan program pendidikan nonformal, baik dalam proses pembalajaran maupun pengelolan program. Beberapa ahli telah melakukan berbagai penelitian bagaimana variable lingkungan masyarakat, lingkungan sosial dan budaya sebagai sumber daya pen-dukung berpengaruh bagi berhasilnya kegiatan-kegiatan pendidikan nonformal.

Berbagai variable yang teridentifikasi bagaimana peran lingkungan sosial masyarakat seperti agama, budaya, kesehatan, serta kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, seperti gotong-royang (*mutual help*), partisipasi, swadaya (*self-reliant*), adalah sisi positif kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan variable pengaruh dalam meningkatkan keberhasilan program-program pendidikan nonformal.

Pendektan pembangunan dari bawah atau (*grass rooth leve/ botton up approach*) merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam setiap pembangunan masyarakat., karena model pendekatan pembangunan ini murni datang dari masyarakat, atau masyarakatlah yang mempunyai keinginan (kebutuhan), kemudian merencanakan pembangunan, mengelola proses pembangunan dan memeliharanya. Model pembangunan masyarakat seperti tersebut sering ditemukan dalam berbagai kegiatan pembangunan masyarakat terutama di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Pendekatam lain dalam pembangunan masyarakat dikenal dengan istilah pendekatan dari atas atau pemerintah (*top down approach*), di mana pendekatan pembangunan dilakukan atas dasar kepentingan pemerintah dalam rangka membangun atau memberdayakan masyarakat, dengan demikian perencanaan pembangunan datang dari pemerintah itu sendiri setelah sebelumnya melihat atau mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan pembangunan masyarakat di Indonesia dikenal pula dengan istilah pendekatan pembangunan masyarakat terpadu (*integrated approach*). Pendekatan model ini dilakukan dengan cara penyatuan kebutuahan masyarakat dengan kepentingan pembangunan yang diharapkan oleh pemerintah.[[65]](#footnote-66)

Dari ilustrasi tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa pemahaman mendasar tentang peran masyarakat sebagai sumber belajar dan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat dijadikan dasar dalam pengembangan dan pembangunan pendidikan nonformal, khususnya dalam pengembangan kurikulum dan implementasi program. Kondisi ini dapat ditelaah dari sejauh mana kurikulum dan program pendidikan nonformal atau materi yang dikembangkan dapat menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat serta bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan program-program pendidikan nonformal. Model pembangunan masyarakat nelayan sangat berbeda dengan masyarakat pertanian, masyarakat pegunungan, dan masyarakat kota. Dengan demikian terpadunya kurikulum yang dikembangkan dengan kondisi sosial budaya, alam lingkungan masyarakat adalah satu sisi fondasi yang harus menjadi alasan keberhasilan pengembangan program pendidikan nonformal dalam membangun kompetensi warga belajar.

1. **Masyarakat Sebagai Sasaran Pendidikan Nonformal**

Konsep pendidikan nonformal dalam kerangka pembangunan masyarakat dapat dilihat dari dua sisi; *pertama,* masyarakat sebagai sumberdaya pembelajaran, dan *kedua* masyarakat sebagai sasaran pembelajaran. Kedua hal tersebut sangatlah penting untuk diperhatikan, karena implementasi pendidikan nonformal dalam kerangka masyarakat belajar (*learning society*) melekat dengan kedua peran tersebut. Sebagai sumberdaya pebelajaran, peran masyarakat dapat dilihat dari daya dukung terhadap implementasi dan pengelolaan program, serta pengembangan program dimasa depan. Sedangka masyarakat sebagai sasaran, dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai program yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan, keterampilan dan kualitas dirinya.

Pendidikan nonformal segabai bagian dari sistem pendidikan memiliki tugas sama dengan pendidikan lainnya (pendidikan formal) yakni memberi-kan pelayanan terbaik terhadap masyarakat terutama masyarakat sasaran pendidikan nonformal. Sasaran pendidikan nonformal yang semakin luas yang tidak hanya sekedar berhubungan dengan masyarakat miskin dan bodoh (terbelakang, buta pendidikan dasar, putus sekolah (*drop out*) pendidikan formal), akan tetapi sasaran pendidikan formal terus meluas maju sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan lapangan kerja, perubahan masyarakat terutama berkaitan dengan budaya masyarakat itu sendiri.

Mengingat sasaran tersebut, maka program/ kegiatan pendidikan nonformal harus terus diperluas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan masyarakat. Pada prinsipnya perluasan kegiatan/ program pendidikan nonformal harus sejalan dengan pemikran baru tentang konsep belajar (*learning*), dimana belajar yang terkesan hanya berlangsung disekolah (formal) kurang tepat lagi dan mulai bergeser ke luar setting persekolahan. Balajar harus dipandang sama dengan penemuan dan pemecahan masalah dalam hidup dan kehidupan, kita harus belajar dari apa yang kita kerjakan, kita harus memanfaatkan setiap pengalaman sebagai sebuah proses belajar. Berbagai lembaga yang ada pada masyarakat kita, pemerintah, swasta, toko-toko, tempat-tempat rekreasi, organisasi, gereja, masjid, hutan, pasar, pabrik, kooperasi, asosiasi dan lain-lain merupakan sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk belajar. Di mana kesemua lembaga tersebut dapat dimanfaatkan atau diakses sebagai wahana belajar oleh keluarga, anak, teman, pelayanan, dokter, guru, pekerja, pengawas, pemagang, dan lain-lain. Dengan demikian belajar dapat dialakukan dalam berbagai situasi baik di dalam maupun di luar lembaga pendidikan dan tidak harus di kelas dengan tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan diri.

Perubahan, pengembangan dan perluasan pendidikan nonformal memberikan suatu apresiasi dan nuansa baru terhadap cara-cara pendidikan nonformal dalam menyediakan pendidikan bagi masyarakat, terutama orang dewasa, baik bagi mereka yang tidak memiliki akses kepada pendidikan formalnya terbukti tidak memadai dan tidak relevan dengan kehidupan dan situasi yang berkembang di lingkungannya (masyarakat).

Proses pembangunan menurut partisipasi jutaan orang dewasa yang terdidik, sementara lembaga pendidikan formal yang ada tidak mampu mengakses permasalahan-permasalahan pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Di daerah tertentu sejumlah penduduk menentukan bahwa sistem pendidikan persekolahan tidak mampu membekali keterampilan-keterampilan yang mereka butuhkan untuk bersaing secara terbuka dan gamblang dalam masyarakat ternologis.

Proses pendidikan itu mengembang ke luar dari sistem formal terstruktur, ke dalam suatu sistem konfigurasi baru dari suatu rangkaian pemikiran dan pengalaman yang terpisah secara melebar, dan jenis pertemuan lainnya dengan mendayagunakan fasilitas yang tersedia. Peran pendidikan nonformal sebagai komplemen, suplemen maupun substitusi pandidikan formal (sekolah) merupakian suatu konfigurasi yang sesuai dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat (*contextual* *based* *and* *liferelefant*), sehingga mampu mewujudkan program/ kegiatan pendidikan nonformal yang strategis dan fungsional dan fungsional bagi masyarakat.

Munculnya konsep masyarakat gemar belajar sepanjang hayat sebagai konsep utama (*master concept*), mendorong individu, lembaga, asosiasi, masyarakat peduli pendidikan atau badan usaha lain untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan cara berfikir baru dalam merespon tantangan kebutuhan kebutuhan baru masyarakat tentang pendidikan dan belajar. Sekolah sebagai program formal tidak lagi menjadi satu-satunya wadah (wadah tunggal) yang memonopoli pendidikan juga badan-badan bisnis tidak lagi mengurusi bisnis semata, akan tetapi sudah mulai bergeser ikut serta mengurusi pendidikan pendidikan khususnya pendidikan nonformal. Lahirnya organisasi-organisasi baru berpenampilan pendidikan yang lembaga-lembaga pendidikan tanpa label sebagai tambahan, perluasan lanjutan dan lainnya memberi kesempatan dan kemudahan kepada masyarakat untuk belajar membelajarkan diri. Sehingga lembaga-lembaga tersebut menjadi pendorong untuk ikut andil mengembangkan pendidikan nonformal.

Ada beberapa peran masyarakat tertentu dalam penddidikan nonformal diantaranya adalah: masyarakat ikut membangun PKBM, sanggar-sanggar kegiatan belajar lain, magang, kejar usaha produktif, pendidikan keagamaan dalam bentuk pesantren memberikan bekal kepada santri dan tidak hanya dalam bentuk pendidikan agama akan tetapi sudah mulai bergeser pada pendidikan umum, dan ketrampilan wirausaha sebagai bekal hidup dan kehidupannya dimasyarakat. Memasyarakatkan usaha pendidikan secara luas melalui organisasi masyarakat dalam dunia pendidikan dikenal juga juga dengan sebutan masyarakat gemar belajar (*learning society*). Begitu pula bekal-bekal pendidikan dan ketrampilan yang berhubungan dengan mata penca-harian lainnya. (pertanian, perikanan dan ndustri rumah tangga). [[66]](#footnote-67)

Dengan melebarnya pelaksanaan pendidikan nonformal sesuai dengan kondisi dan konsep belajar pendidikan nonformal serta menjaga mutu dan sensitivitas pendidikan nonformal di tengah-tengah masyarakat, maka lima strategi dasar yang perlu dikembangkan adalah:

* Pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*), masyarakat dipandang sebagai subjek pembangunan. Mesyarakat diaku memiliki potensi untuk berkembang dan sedemikian rupaditumbuhkan agar mampu membangun dirinya.
* Pendekatan partisipatif (*participatory approach*), mengandung arti, bahwa masyarakat, lembaga-lembaga terkait, dan atau komuntas dilibatkan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat.
* Pendekatan kolabiratif (*collaborative appoarch*), dalam pembangunan masyarakat perlu adanya kerja sama dengan pihak lain (teritegrasi) dan terkoordinasi dan sinergi.
* Pendekatan berkelanjutan (k*ontinuanion appoarh*) pembangunan masyarakat dilakukan secara berkesinambungan, untuk itulah pembinaan kader yang berasal dari masyarakat adalah hal yang paling pokok.
* Pendekatan budaya (*cultural approach*) penghargaan budaya dan kebiasaan, adat istiadat yang tumbuh di tengah-tengah dalam pembangunan masyarakat adalah hal yang perlu diperhatikan.

Dengan kelima strategi tersebut, maka pendidikan nonformal seperti apa yang dibutuhkan masyarakat dalam arti program pendidikan nonformal yang mampu menyentuh dan mengangkat masyarakat menjadi lebih baik dalam kehidupannya (*better living*) yang ditandai dengan meningkatkan pendekatan (ekonomi), kesadaran akan lingkungan sosialnya, atau masyarakat yang mengerti akan lingkungan sosialnya, atau masyarakat yang mengerti dan memahami bagaimana membangun dirinya.

Mengacu pada prinsip dan strategi dasar yang perlu diperhatikan pendidikan nonformal dalam rangka meningkatkan perannya dimasyarakat adalah:

* Mengembangkan program-program pendidikan nonformal yang mampu mengembangkan masyarakat, sehingga mereka memiliki daya suai, daya lentur, inovatif, dan memiliki sikap dan perilaku mandiri.
* Mengembangkan program-program pendidikan yang mampu mengangkat kemiskinan masyarakat perdesaan dan perkotaan, baik melalu program pendidikan ketrampilan maupun jenis program pendidikan lain yang mampu menyentuh kebutuhan nyata dalam kehidupan masyarakat.
* Menemukenali permasalahan-permasalahan masyarakat yang dapat dijadikan atau disentuh melalui peran-peran dan tugas-rugas pendidikan nonformal nyata dengan tetap menjaga orisinilitas atas pembangunan masyarakat oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.
* Mengembangkan program-program pendidikan nonformal dengan tetap mengacu pada teknologi pendidikan nonformal yang serba baru inovatif serta biaya murah.

Berdasarkan pada peran-peran pendidikan nonformal serta strategi dasar pengembanagnnya ditengah-tengah masyarakat, maka pengutan peran pendidikan nonformal di daerah tidak hanya pada, permasalahan-permasalahan pendidikan nonformal tu sendiri secara internal, baik yang berhubungan dengan kurikulum, model-model program, sasaran program, maupun keberadaan program (peran dan fungsi) ditengah-tengah masyarakat. Akan tetapi pengutan peran pendidikan nonformal perlu dilakukan terutama pada pandangan masyarakat dan pemerintah terhadap pengakuan program-program pendidikan nonformal (eksternal).

Penguatan ini penting karena masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai sasaran pendidikan nonformal akan tetapi masyarakat dipandang sebagai pelaku (sumber belajar) pendidikan nonformal itu sendiri. Sedangkan harapan terhadap pemerintah hanya berhubungan dengan pengakuan terutama dilaksanakan pada tata kebijakan yang dibangun dalam rangka mengkondisikan keberadaan pendidikan nonformal di tengah-tengah masyarakat.

1. **Pendidikan Nonformal dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Kontribusi pendidikan nonformal dalam perberdayaan masyarakat, secara lebih jelas dapat dilihat dari definisi dan hakekat peran pendidikan nonformal itu sendiri. Dan beberapa defnisi yang telah diuraikan terdahulu Nampak adanya beberapa kesamaan peran pendidikan nonformal dan pendidikan sosial dalam memberdayakan masyarakat. Kesamaan peran tersebut dapat dilihat dari: (a) hakekat pendidikan nonformal adalah membelajarkan masyarakat yang dilakukan diluar sistem pendidikan nonformal, (b) kegiatan pembelajaran dalam pendidikan nonformal merupakan aktivitas yang sengaja dan diorganisasi secaca sistimatis untuk mencapai tujuan tertentu, (c) sesuai dengan fungsi pendidikan nonformal sasarannya adalah semua warga masyarakat dalam membantu membelajarkan (pemetaan pendidikan), dan (d) bertujuan memberikan bekal pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan pengembangan sumberdaya manusia sebagai modal pambangunan nasional.

Sudjana secara lebih tegas menerangkan tugas pendidikan nonformal adalah : (a) membelajarkan warga belajar agar mereka memiliki dan mengembangkan ketrampilan, pengetahuan, sikap, nlai-nilai dan aspirasi untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan di masa depan, dan (b) membelajarkan warga belajar agar mereka mampu meningkatkan dan memanfaatkan sumberdaya alam guna meningkatkan taraf hidupnya.[[67]](#footnote-68) Bentuk pendidikan berbasis masyarakat yang masih ada dan tetap eksis sampai saat ini, bahkan menjadi model pendidikan yang cukup menjadi *trend* adalah madrasah dan pesantren. Kemudian berkembang berupa diklat, kursus yang diselenggarakan oleh swasta seperti kursus dakwah, bahasa Inggris, bahasa Arab, menjahit, pertukangan, dan lain sebagainya yang bersifat praktis. Sebenarnya sebelum ada kursus yang sampai saat ini masih berjalan, ada model pelatihan yang disebut dengan istilah magang, baik magang kepada orang tua, kepada orang yang lebih senior, maupun magang di kantor-kantor pada perkembangan berikutnya.[[68]](#footnote-69)

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Kidervatter memberi peran secara jelas tentang pendidikan nonformal dalam rangka proses pemberdayaan (*empowering process*), peran pendidikan nonformal tidak saja mengubah individu, tetapi juga kelompok, organisasi dan masyarakat. Pendidikan nonformal sebagai proses pemberdayaan mengandung arti luas, yakni mencakup meningkatkan pengetahuan, sikap, ketramplan, dan pembangunan kemampuan lainnya kearah kemandirian hidup. Kindervatter menjelaskan bahwa: peran pendidikan nonformal sebagai proses pemberdayaan di dalamnya meliputi peningkatan dan perubahan sumberdaya manusia sehingga mampu membangun masyarakat dan lingkungannya. LaBelle mengartikannya sebagai strategi perubahan strategi perubahan sosial.[[69]](#footnote-70)

1. **Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal**

Penyelenggara pendidikan nonformal dapat terdiri atas Pemerintah, badan, kelompok, atau perseorangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan jenis pendidikan yang diselenggarakannya. Masyarakat dapat menyeleng-garakan semua jenis pendidikan non formal, kecuali pendidikan kedinasan.

Penyelenggaraan PNF (pendidikan nonformal) oleh swasta terdiri dari badan-badan kemasya-rakatan, dan kelompok atau perseorangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. PNF yang diselenggarakan swasta, terutama melayani selera kebutuhan masyarakat, seperti penyelenggaraan satuan kursus. Adapun pihak pemerintah, dalam hal ini Ditjen PLSP, mengemban tugas, peran, dan tanggung jawab, terutama melayani perizinan, standarisasi dan menyelenggarakan pendidikan masyarakat yang kurang diminati pihak swasta, seperti penyelenggaraan kelompok belajar.

Ditjen PLSP mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pokok departemen di bidang pendidikan luar sekolah dan pemuda berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri. Fungsinya sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan serta perizinan di bidang PNF dan pemuda sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan pembinaan PNF dan pemuda sesuai dengan tugas pokok Direktorat Jenderal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kebijaksanaan yang ditetapkan Ditjen PLSP di bidang pendidikan luar sekolah dan pemuda sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan kejar Paket A yang dipadukan dengan pendidikan mata pencaharian yang diarahkan untuk menuntaskan pemberantasan buta aksara Latin dan angka.
2. Merintis dan mengembangkan pelaksanaan program kejar Paket B dan C yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan mempersiapkan perintisan program baru.
3. Meningkatkan pelaksanaan kejar usaha dan program magang, dalam rangka memberikan keterampilan kepada masyarakat agar mempunyai mata pencaharian yang tetap dan layak.
4. Meningkatkan pembinaan lembaga kursus Diklusesmas dengan standardisasi kurikulum dan sertifikasi nasional.
5. Melanjutkan dan meningkatkan program pembinaan generasi muda, antara lain melalui kegiatan pertukaran pemuda tingkat nasional, regional dan internasional, kegiatan Paskibraka, napak tilas jejak pahlawan, pendidikan kepemimpinan dan keterampilan pemuda.
6. Melanjutkan meningkatkan pelaksanaan latihan bagi penilik, tutor/fasilitator, tenaga teknis, penyelenggara/penguji sumber belajar Diklusesmas.
7. Melanjutkan pengangkatan, penempatan, dan peningkatan mutu pada UPT.
8. Melanjutkan dan meningkatkan pengadaan buku Paket A, Paket B, Paket C dan buku pelengkap lainnya, rehabilitasi/perluasan pembangunan gedung SKB, serta peralatan untuk mendukung pelaksanaan program kepemudaan.
9. Melanjutkan usaha penataan kelembagaan UPT (SKB), dan meningkatkan daya guna dan hasil guna Fasilitas serta meningkatkan pemeliharaannya.

Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan PNF di antaranya terdapat pada berbagai departemen dan nondepartemen. Adapun kegiatannya dan lembaganya sebagai berikut:

1. Ditjen PLSP merupakan penyelenggara kegiatan pendidikan luar sekolah yang berkenaan dengan pembinaan kepemudaan, latihan kelompok kerja produktif, bimbingan kader pemimpin, kesetaraan pendidikan dasar, pendidikan kejuruan masyarakat, pendidikan kewanitaan, Kejar Paket A, B dan C, Kejar Usaha, kursus keterampilan, magang dan program belajar mandiri. Kegiatan lainnya antara lain KKN, Yanmas dan Dikmas yang diselenggarakan perguruan tinggi.
2. Departemen Pertanian merupakan penyelenggara kegiatan PNF yang berhubungan dengan penyuluhan pertanian, kursus pertanian dan pertukangan, demonstrasi pertanian lapangan, dan bimbingan sapta usaha tani.
3. Departemen Kesehatan merupakan penyelenggara PNF yang berkenaan dengan Posyandu, bimbingan kesehatan lingkungan, perbaikan gizi (UPGK), Puskesmas, latihan bagi dukun bayi, pencegahan penyakit menular dan keluarga berencana.
4. Departemen Tenaga Kerja merupakan penyelenggara kegiatan PNF yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja, baik bidang industri (BLKI), jasa maupun pertanian (BLKP), PLK, TKS-BUTSI, *Mobil Training Unit*, magang dan latihan di perusahaan atau industri.
5. Departemen Penerangan merupakan penyelenggara kegiatan PNF terutama yang berkaitan dengan berbagai penyuluhan kepada masyarakat, seperti siaran pedesaan, kelompencapir, dan asah terampil.
6. Departemen Sosial merupakan penyelenggara kegiatan PNF yang menyangkut bimbingan sosial masyarakat, karang taruna, bimbingan keterampilan praktis, pembinaan rehabilitasi kesejahteraan sosial, seperti dalam panti asuhan dan lembaga pengentasan kemiskinan.
7. Departemen Dalam negeri merupakan penyelenggara kegiatan PNF yang dilaksanakan di berbagai organisasi, seperti : UGKP, kelompok pembangunan, teknologi pedesaan, LKMD, PKK, pramuka, dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan.
8. Departemen Agama merupakan penyelenggara kegiatan PNF melalui dakwah, bimbingan kehidupan keluarga, pembinaan umat beragama, pembinaan pondok pesantren, kursus keagamaan, dan pembinaan organisasi keagamaan.
9. Departemen Koperasi merupakan penyelenggara kegiatan PNF dalam bentuk penyuluhan, kursus koperasi, pendidikan koperasi, KUD dan pembinaan organisasi perkoperasian.
10. Departemen yang merupakan penyelenggara PNF bukan hanya terbatas pada departemen yang telah disebutkan di atas saja, melainkan banyak departemen lain yang belum disebutkan, seperti Dephankam, Depkeu, Deptamben dan lain-lainnya.
11. Lembaga pemerintah non departemen yang merupakan penyelenggara kegiatan PNF, antara lain Biro Pusat Statistik, Dolog, LIPI, perpustakaan, permusiuman, pusat studi (Percobaan) gelanggang (generasi muda), LAN, dan TNI.[[70]](#footnote-71)
12. **Hambatan Dalam Pendidikan Nonformal**

Dalam peneyelenggaraan pendidikan pasti ada suatu hambatan, hamabatan ini biasanya timbul dari warga maupun dari sumber belajar, atau dari sarana dan prasarana yang tidak memadai. Oleh karena itu hambatan ini perlu diupayakan penanggulanganya sedini mungkin atau diramalkan ketika pendidikan nonformal disusun.[[71]](#footnote-72) Adapun permasalahannya sebagai berikut:

1. Masalah Kurikulum

Dalam konteks otonomi daerah, kurikulum suatu lembaga pendidikann tidak sekedar daftar mata pelajaran yang dituntut di dalam suatu jenis dan jenjang pendidikan. Dalam pengertiannya yang luas, kurikulum berisi kondisi yang telah melahirkan suatu rencana atau program pelajaran tertentu, juga berkenaan dengan proses yang terjadi di dalam lembaga (proses pembelajaran), fasilitas yang tersedia yang menunjang terjadinya proses, dan akhirnya produk atau hasil dari proses tersebut.

Kurikulum adalah keseluruhan program, fasilitas, dan kegiatan suatu lembaga pendidikan atau pelatihan untuk mewujudkan visi dan misi lembaganya. Oleh kerena itu, pelaksanaan kurikulum untuk menunjang keberhasilan subuah lembaga pendidikan harus ditunjang hal-hal sebagai berikut:

* Tersedianya tenaga pengajar (guru) yang kompeten;
* Tersedianya fasilitas fisik atau fasilitas belajar yang memadai dan menyenangkan;
* Tersedianya fasilitas bantu untuk proses belajar mengajar;
* Adanya tenaga penunjang pendidikan, seperti tenaga administrasi, pembimbing, pustakawan, laboratorium;
* Tersedianya dana yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan;
* Manajemen yang efektif dan efisien;
* Terpeliharanya budaya yang menunjang, seperti nilai-nilai religious, moral, kebangsaan, dan lain-lain;
* Kepemimpinan pendidikan yang visioner, transparan, dan akuntabel.[[72]](#footnote-73)

Kurikulum kelembagaan pendidikan yang baik adalah kurikulum kelembagaan pendidikan yang berkembang dari dan untuk masyarakat, yaitu kelembagaan pendidikan yang bersandarkan pada komunitas masyarakat. Namun demikian, pada zaman reformasi dan keterbukaan seperti sekarang, permasalahan yang timbul adalah bagaimana mengubah pola pikir yang dikembangkan secara sentralistik dan memasung kreatifitas masyarakat, menjadi pola pikir kemitraan. Dampak langsung dari sekian lama sistem sentralistik yang dijalankan adalah terpolanya cara berfikir masyarakat kebanyakan, baik birokrasi, para pendidik, maupun masyarakat umumnya. Mereka terbiasa berfikir dan bekerja dengan adanya juklak, jukinis, serba aturan, sehingga sulit lahirnya kreatifitas, improvisasi, inovasi. Kemitraan yang dimaksud adalah kemitraan antara masyarakat dan kelembagaan-kelembagaan pendidikannya.[[73]](#footnote-74)

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan pilar yang paling utama dalam melakukan implementasi desentralisasi pendidikan. Banyak kekhawatiran dalam bidang kesiapan SDM ini, di antaranya belum terpenuhinya lapangan kerja dengan kemampuan sumber daya yang ada.[[74]](#footnote-75) Akhir-akhir ini, permasalahan terkait dengan kualitas bangsa Indonesia masih mendapat kritikan yang tajam. Demikian ini tentu terkait denan masalah kualitas sumberdaya manusia (SDM) Indonesia.[[75]](#footnote-76) Sebab, pendidikan sebagai sentral utama peningkatan mutu SDM telah diterima dan diwacanakan, pendekar dunia usaha, termasuk birokrat negara. Untuk mendorong semangat kita mungkin patut dikemukakan di sini pernyataan Tony Blair, perdana menteri Inggris pada saat menduduki jabatan, di mana kepada para wartawan dia menyampaikan tentang agenda utama yang akan diprioritaskan untuk pembangunan SDM. Agenda tersebut yakni: *pertama*, pendidikan, *kedua*, pendidikan, dan *ketiga*, pendidikan. Menyusul agenda selanjutnya adalah pembangunan ekonomi, polotik, hukum, dan lain sebagainya.[[76]](#footnote-77) Bagaimanapun yang terjadi dalam pembangunan SDM yang lebih utama yaitu pendidikan, sedangkan yang lainnya seperti ekonomi, politik, hukum, kesejahteraan dan sebaginya akan mengikuti pendidikan yang berkembang. Pendidikan yang lebih maju maka akan menjadikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Bagaimanapun sumberdaya manusia yang kurang profesional akan menghambat pelaksanaan sistem pendidikan. Penataan SDM yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya menyebabkan pelaksanaan pendidikan tidak professional. Banyak tenaga kependidikan yang latar belakang pendidikannya tidak relevan ditempatkan di dunia kerja yang ditekuni.[[77]](#footnote-78)

1. Dana, Sarana, dan Prasarana

Persoalan dana merupakan persoalan yang paling krusial dalam perbaikan dan pembangunan sistem pendidikan di Indonesia, dan dana juga merupakan salah satu syarat atau unsur yang sangat menentukan keberhasilan penyalenggaraan pendidikan. Selama ini dikeluhkan bahwa mutu pendidikan nasional rendah karena dana yang tidak mencukupi, anggaran untuk pendidikan masih rendah.[[78]](#footnote-79) Terkait dengan fungsi dan peran keuangan ini, Sudarwan Danim melaporkan bahwa ketika kebijakan reformasi pendidikan ingin diimplementasikan, kemampuan finansial untuk mendukungnya tidak terhindari. Sebab, kemampuan dibidang keuangan merupakan sumber frustasi bagi para pembaharu. Keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedua hal tersebut merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar-mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lainnya.[[79]](#footnote-80)

Dalam konteks ekonomi, pada dasarnya pendidikan merupakan investasi panjang yang hasilnya tidak bisa dilihat satu dua tahun, tetapi jauh kedepan. Sebagai suatu investasi produktif, mestinya pembangunan pendidikan harus memperhitungkan dua konsep utama, yaitu biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*) pendidikan. Berkaitan dengan biaya pendidikan ini sendiri, menurut Ace Suryadi terdapat empat agenda kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu: (1) besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan (*revenue*); (2) aspek keadilan dalam alokasi anggaran; (3) aspek efisiensi dalam pendayagunaan anggaran; dan (4) anggaran pendidikan dan desentralisasi pengelolaan.

1. Masalah Organisasi Kelembagaan

Dalam hal kelembagaan kependdikan antar kabupaten/ kota dan provinsi tidak sama dan terkesan berjalan sendiri-sendiri, baik menyangkut struktur, nama organisas kelembagaan, dan lain sebagainya.[[80]](#footnote-81) Kelembagaan pendidi-kan yang memiliki orientasi pada masyarakat, serta setidaknya dimiliki oleh komunitas masyarakat lokal, menuntut kelembagaan-kelembagaan yang baru berdasarkan paradigma pengembangan kelembagaan-kelembagaan yang tekait dengan kelembagaan pendidikan daerah.[[81]](#footnote-82)

1. Masalah Perundang-Undangan

Maka pengaturan otonomi daerah dalam bidang pendidikan secara tegas telah dinyatakan dam PP Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur pembagian kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Semua urusan pendidikan di luar kewenangan pemerintah pusat dan provinsi tersebut sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah kabupaten/ kota dalam menangani layanan pendidikan amat besar dan berat, terutama bagi daerah yang kemampuan diri (*capacity building*) dan sumber daya pendidikannya kurang.[[82]](#footnote-83) Karena bagaimanapun sistem sentralisasi, dekonsentrasi, dan desentralisasi dalam pemerintahan mempunyai implikasi langsung terhadap penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, terutama yang berkaitan dengan masalah kebijakan, manajemen, mutu, kontrol, dan sumber-sumber dana pendidikan.[[83]](#footnote-84)

1. Masalah Pembinaan dan Koordinasi

Disamping pembinaan, koordinasi juga sangat diperlukan bagi daerah, hal ini terutama untuk menghindari seperti terjadinya tumpang tindih program, gap antar daerah, dan sebagainya.[[84]](#footnote-85) Seperti yang tertera dalam UU Nomor 32 tahun 2004 pada darasnya mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan-pembinaan agar permasalahan yang muncul dapat diminimalisasi.[[85]](#footnote-86)

1. **Tujuan dan Fungsi Pendidikan Nonformal**

UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan perangkat peraturannya yang telah terbit, merupakan landasan yang mengatur penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan secara nasional dengan memberikan ketetapan, kepastian, dan jaminan secara hukum. Salah satu hal yang digariskan : “bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kecerdasan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia”. Dengan demikian, sistem pendidikan nasional sekaligus alat dan tujuan untuk memperjuangkan tercapainya cita-cita dan tujuan nasional.

Fungsi dan tujuan Pendidikan nasional dinyatakan sebagai berikut :

*“Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional”.*

*“Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.[[86]](#footnote-87)*

Sehubungan dengan itu, pembangunan nasional di bidang pendidikan harus meliputi beberapa tujuan, antara lain:

1. Mengusahakan pembatukan manusia Pancasila yang berkualitas dan mandiri serta memberi dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Mengarahkan peserta didiknya mampu mengembangkan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat.
3. Mengusahakan pembentukan manusia Pancasila dan manusia pembangunan yang tinggi kualitas dan kemandiriannya untuk mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh, sehingga memberi dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara.
4. Menghasilkan manusia terdidik yang dapat meningkatkan kemampuan bangsa dalam semua sektor dan bidang kehidupan.
5. Meningkatkan kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia, baik fisik maupun nonfisiknya.
6. Menghasilkan insan yang dapat mengembangkan diri sesuai dengan keadaan masya-rakat yang senantiasa berubah.
7. Mampu mengembangkan program untuk memasuki masyarakat yang maju.
8. Memungkinkan mempertahankan kelangsungan hidup dan mempertahankan dirinya.

Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan sepanjang perjalanan hidupnya. Sistem Pendidikan Nasional memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara dan memberikan hak penuh untuk memperoleh pendidikan pada tahapan mana pun dalam perjalanan kehidupannya. Pendidikan dapat diperoleh, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pendidikan seumur hidup merupakan acuan agar manusia Indonesia sepanjang hayatnya mendapat kesempatan secara terus-menerus untuk memperoleh pendidikan bilamana memerlukannya, baik melalui pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah.[[87]](#footnote-88) Dalam mendapat hak pendidikan sesuai dengan UU pendidikan nasional no 20 tahun 2003 tentang hak kewajiban warga Negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah yang diatur pada pasal 5 ayat 1 sampai 5.[[88]](#footnote-89) Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Santoso S. Hamijoyo menyatakan bahwa tujuan pendidikan luar sekolah adalah supaya individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosial dan alamnya dapat secara bebas dan bertanggung jawab menjadi pendorong kearah kemajuan, gemar berpartisipasi memperbaiki kehidupan mereka. Memperbaiki kehidupan atau taraf hidup adalah tujuan yang ingin dicapai. Artinya, apa pun yang dipelajari oleh orang-orang tersebut hendaknya mampu membantu mereka guna memper-baiki kualitas hidupnya secara nyata sekarang dan tidak dijanjikan dalam waktu lama atau yang akan datang. Kebebasan yang disertai tanggung jawab bararti para peserta didik bebas mau belajar apa saja asalkan bermanfaat kepada masyarakat dan tidak sebaliknya belajar sesuatu yang membahayakan masyarakat. Demikian pula apa yang dipelajari bukan hal-hal yang berten-tangan dengan norma masyarakat dan nilai kemanusiaan. Perubahan yang dilakukan bukan sekedar perubahan, melainkan harus tertuju pada kemajuan; bukan sebaliknya.[[89]](#footnote-90)

Dalam kaitannya dengan pendidikan formal di negara industry, dalam hal mana semua anak sebelum usia 15 tahun secara penuh wajib mengikuti sekolah, maka pendidikan nonformal memiliki tugas sebagai berikut: (1) pendidikan nonformal (PNF) membantu menyiapkan anak-anak prasekolaah untuk memasuki sekolah melalui *play group*, pusat pengasuhan (*day care center*), program pendidikan melalui televisi, dan sebagainya; (2) PNF bertugas melengkapi atau *complements* sekolah dengan memberi pengalaman belajar melalui ekstrakulikuler seperti olahraga, kegiatan seni dan budaya, organisasi remaja dan pemuda; (3) PNF menindak lanjuti sekolah dengan menyajikan berbagai program pendidikan berkelanjutan atau kesepakatan pendidikan lanjut setelah keluar dari sekolah atau menyeleseikan sekolah.[[90]](#footnote-91) Peranan pendidikan nonformal bertambah meningkat. Sebagai jalur penyelenggara kegiatan pendidikan, PNF memiliki peranan serta kedudukan yang sejajar tingkatannya dengan pendidikan sekolah dalam melaksanakan fungsi pendidikan nasional dan mencapai tujuan pendidikan nasional.

Tujuan penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagai berikut:

1. Melayani warga belajar supaya tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya ;
2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan
3. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.[[91]](#footnote-92)

1. Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya : 2008), hal. 107-108 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid.,* hal. 30 [↑](#footnote-ref-3)
3. Lexi J. Moeong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rusdakarya : 2006), hal. 16 [↑](#footnote-ref-4)
4. Desmita, *Psikologi Perkembangan*…, hal. 30 [↑](#footnote-ref-5)
5. Uswah wardiana, *Psikologi Umum*, (Jakarta : PT. Bima Ilmu, 2004), hal. 102-103 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid*., hal. 106 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid*., hal. 104 [↑](#footnote-ref-8)
8. Desmita, *Psikologi Perkembangan*…, hal. 108 [↑](#footnote-ref-9)
9. Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta : Gramedia, 2000) hal. 818 [↑](#footnote-ref-10)
10. Uswah wardiana, *Psikologi...,* hal. 103 [↑](#footnote-ref-11)
11. Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta : LKiS, 2005), hal. x-xi [↑](#footnote-ref-12)
12. Kusnadi, *Jaminan Sosial Nelayan,* (LKiS :Yogyakarta,2007), hal. 7-8 [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibid., hal. 97 [↑](#footnote-ref-14)
14. Nur Syam, *Islam..*, hal. 165 [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid.*, hal. 98-100 [↑](#footnote-ref-16)
16. Kusnadi, *Jaminan Sosial...,* hal. 103 [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid*., hal.104 [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid.,* hal. 106 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid*., hal. 119-120 [↑](#footnote-ref-20)
20. Abd Aziz, *Orientasi System Pendidikan Agama di Sekolah,* (Yogyakarta : Teras, 2010), hal. 5 [↑](#footnote-ref-21)
21. Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005) hal. 29 [↑](#footnote-ref-22)
22. Abd Aziz, *Orientasi System Pendidikan..*., hal. 6 [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid.,* hal. 8 [↑](#footnote-ref-24)
24. Muhaimin*, Paradigma pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya), hal. 75 [↑](#footnote-ref-25)
25. Abdurrahman An Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, (Jakarta : Gema Insani, 1995), hal. 136-137 [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid.,* hal. 137-138 [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid.,* hal. 139 [↑](#footnote-ref-28)
28. Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan…,* hal. 155 [↑](#footnote-ref-29)
29. Abd Aziz, *Orientasi System Pendidikan..*., hal. 50 [↑](#footnote-ref-30)
30. Ahmad Tafsir*, Ilmu Pendidikan*…, hal. 155 [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid.*, hal. 163 [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid.,* hal. 163 [↑](#footnote-ref-33)
33. Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*.., hal. 75 [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid*., hal. 75-76 [↑](#footnote-ref-35)
35. Abdurrahman An Nahlawi, *Pendidikan Islam…,* hal. 146 [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid*., hal. 76 [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid*., hal. 77 [↑](#footnote-ref-38)
38. Abd Aziz, *Orientasi System Pendidikan..*., hal. 49 [↑](#footnote-ref-39)
39. Abdurrahman An Nahlawi, *Pendidikan Islam…,* hal. 178 [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid*., hal. 179 [↑](#footnote-ref-41)
41. Abd Aziz, *Orientasi System Pendidikan..*., hal. 13 [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid*., hal. 14 [↑](#footnote-ref-43)
43. Abdurrahman An Nahlawi, *Pendidikan Islam…,* hal. 117 [↑](#footnote-ref-44)
44. Abd Aziz, *Orientasi System Pendidikan..*., hal. 10 [↑](#footnote-ref-45)
45. *Ibid.,* hal. 11 [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibid.,* hal. 11 [↑](#footnote-ref-47)
47. *Ibid.,* hal. 12 [↑](#footnote-ref-48)
48. Oong Komar, *Filsafat Pendidikan Nonformal,* (Bandung : CV Pustaka Setia,2006)*,* hal. 213 [↑](#footnote-ref-49)
49. Mustofa Kamil, *Pendidikan nonformal pengembangan melalui pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) di Indonesia* (Bandung : Alfateta, 2009), hal. 13-14 [↑](#footnote-ref-50)
50. Sanapiah Faisal dan Abdillah Hanafi, *Pendidikan Nonformal*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1992), hal. 13-17 [↑](#footnote-ref-51)
51. Mustofa Kamil, *Pendidikan…,* hal. 17-18 [↑](#footnote-ref-52)
52. *Ibid*., hal. 100 [↑](#footnote-ref-53)
53. Mundir Thohi, *Islam Jama’ah dan LDII Doktrin Islam Jama’ah dan Sosialisasinya Dalam Membentuk kesalehan warga LDII,* (Kediri : Sukses *Offset,* 2009), hal. 66 [↑](#footnote-ref-54)
54. *Ibid*., hal. 67 [↑](#footnote-ref-55)
55. Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi*, (Yogyakarta : Lkis, 2010), hal. 233 [↑](#footnote-ref-56)
56. Ahmad Taufiq, *Persepektif Gender Kyai Pesantren Memahami Teks Menurut Relasi Gender Dalam Keluarga,* (Kediri : STAIN Kediri Pres, 2009) hal. 6-7 [↑](#footnote-ref-57)
57. Mundir Thohi, *Islam Jama’ah.,* hal. 84 [↑](#footnote-ref-58)
58. Mustofa Kamil, *Pendidikan…,* hal. 18 [↑](#footnote-ref-59)
59. Saleh Marzuki, *Pendidikan Nonformal Dimensi Dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan, dan Andragog*i, ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 36 [↑](#footnote-ref-60)
60. *Ibid*., hal. 136 [↑](#footnote-ref-61)
61. *Ibid*., hal. 136-137 [↑](#footnote-ref-62)
62. *Ibid*., hal.137-138) [↑](#footnote-ref-63)
63. *Ibid*., hal. 139 [↑](#footnote-ref-64)
64. *Ibid*., hal. 139-140 [↑](#footnote-ref-65)
65. Mustofa Kamil, *Pendidikan nonformal…,* hal. 46-47 [↑](#footnote-ref-66)
66. *Ibid*., hal. 48-51 [↑](#footnote-ref-67)
67. *Ibid*., hal. 52-54 [↑](#footnote-ref-68)
68. Sam M.Chan dan Tuti T. Sam, *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 119-120 [↑](#footnote-ref-69)
69. Mustofa Kamil, *Pendidikan nonformal…,* hal. 54 [↑](#footnote-ref-70)
70. Oong Komar, *Filsafat…,* hal. 219-211 [↑](#footnote-ref-71)
71. Mustofa Kamil, *Pendidikan nonformal…,* hal.73 [↑](#footnote-ref-72)
72. Hasbullah, *Otonomi Pendidikan Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implementasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan,* (Jakarta : PT Rajagrafindo persada, 2007), hal. 21 [↑](#footnote-ref-73)
73. *Ibid*., hal. 22 [↑](#footnote-ref-74)
74. *Ibid*., hal. 23 [↑](#footnote-ref-75)
75. Mustofa Rembangy, *Pendidikan Transformatif Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pasuran Arus Globalisai*, (Yogyakarta : Teras, 2010), hal. 8 [↑](#footnote-ref-76)
76. *Ibid*., hal. 8-9 [↑](#footnote-ref-77)
77. Hasbullah, *Otonomi Pendidikan Kebijakan…,* hal. 24 [↑](#footnote-ref-78)
78. *Ibid*., 25 [↑](#footnote-ref-79)
79. Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam,* (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 163 [↑](#footnote-ref-80)
80. Hasbullah, *Otonomi Pendidikan Kebijakan…,* hal. 26-27 [↑](#footnote-ref-81)
81. *Ibid*., hal. 29 [↑](#footnote-ref-82)
82. *Ibid*., hal. 30 [↑](#footnote-ref-83)
83. *Ibid*., hal. 29 [↑](#footnote-ref-84)
84. *Ibid*., hal. 32 [↑](#footnote-ref-85)
85. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah [↑](#footnote-ref-86)
86. Oong Komar, *Filsafat…,* hal. 217 [↑](#footnote-ref-87)
87. Ibid., hal. 217-218 [↑](#footnote-ref-88)
88. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional, bab IV pasal 5 [↑](#footnote-ref-89)
89. Saleh Marzuki, *Pendidikan Nonformal…,* Hal. 106 [↑](#footnote-ref-90)
90. *Ibid.,* hal. 140-141 [↑](#footnote-ref-91)
91. Oong Komar, *Filsafat…,* hal. 217-218 [↑](#footnote-ref-92)